

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN  
BENIH BERMUTU VARIETAS UNGGUL MELALUI  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)  
DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi  
bidang minat Administrasi Publik

Disusun oleh:

**APRILOGRA**  
**NIM : 016758936**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PANGKALPINANG  
2013**

**ABSTRACT**

*Policy Implementation Analysis of Seed Quality Improvement Using superior variety  
Seeds Through Direct Assistance Program Excellence (BLBU)  
In Bangka Fiscal Year 2011*

Aprilogra  
The Open University  
[aprilogralogra@yahoo.co.id](mailto:aprilogralogra@yahoo.co.id)

*Keywords: Policy Implementation, Superior Seeds Direct Assistance Policy (BLBU)*

*BLBU policies enacted by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2011 About Help Direct Superior Seed and Fertilizer. But there are still obstacles in its implementation and the results are expected to be lower this is due to a variety of problems such as: 1) Aspects of the low quality of human resources and quantity of human resources are insufficient or less, 2) the communication aspect that is not optimal dissemination policy that is not understood well by stakeholders; 3) The structure of the bureaucracy or lack of institutional support duties in order to carry out programs and activities; 4) Disposition, so that the existing policy has not really provide the benefits and positive impact on the farmers crops (paddy rice and fields) in Bangka, Bangka Belitung Islands Province. These conditions then become the focus of research to see the view of the contents of the policy implementation process by looking at some aspects: Communication, Resources, Attitude / Disposition and Bureaucratic Structure. This research is a qualitative descriptive approach with the intention of providing an overview how the implementation of policies in the field and then analyzed using Edwards Theory III (1980). The results showed that the implementation of the policy of Superior Seeds Direct Assistance (BLBU), there are some aspects that support such as seed distribution facilities, and information reasonably good authority while some aspects are less medukung such as: human resources and irrigation facilities, funds , SOP and special department to handle this job does not exist, so it needs to enhanced function and role of these aspects in order to maximize the implementation of this policy BLBU. This study concludes that: 1) Aspect Communications (Transmission, Clarity, Consistency and Coordination) strongly supports the implementation of this policy BLBU, 2) Resources (HR, information, and facilities for authority), some still do not support such Resources Humans (HR) as well as irrigation facilities and funding is not maximized. But the information, authority and facilities that are distributed in the form of seeds has been very supportive, 3) Aspects of Attitude (Attitude implementer, Support Leadership, Incentives for implementing and Transparency), strongly supports the implementation of this policy BLBU, and 4) Aspects of Bureaucratic Structure (SOP and Fragmentation ), yet support the implementation of this policy BLBU.*

## ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul Melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011

Aprilogra  
Universitas Terbuka  
[aprilogralogra@yahoo.co.id](mailto:aprilogralogra@yahoo.co.id)

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

Kebijakan BLBU disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk. Namun dalam Implementasinya masih terdapat kendala dan hasil yang diharapkan masih rendah hal ini dikarenakan oleh adanya berbagai masalah yakni: 1) Aspek kualitas SDM yang rendah dan kuantitas SDM yang ada tidak mencukupi atau kurang; 2) Aspek komunikasi yang tidak optimal sehingga sosialisasi kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan; 3) Struktur birokrasi atau kelembagaan yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka menjalankan program dan kegiatan; 4) Disposisi, sehingga Kebijakan yang ada belum benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif pada masyarakat petani tanaman pangan (padi sawah dan ladang) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi inilah kemudian menjadi fokus penelitian untuk melihat melihat proses implementasi dari isi kebijakan dengan melihat beberapa aspek : Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kebijakan dilapangan lalu kemudian dianalisis menggunakan Teori Edwards III (1980).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini, terdapat beberapa aspek yang mendukung seperti : fasilitas benih yang didistribusikan, wewenang dan informasi cukup baik sedangkan beberapa aspek yang kurang mendukung seperti : sumber daya manusia dan fasilitas sarana irigasi, dana, SOP dan seksi khusus yang menangani pekerjaan ini belum ada, sehingga perlu ditingkatkan lagi fungsi dan peran aspek-aspek tersebut guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan BLBU ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Aspek Komunikasi (Transmisi, Kejelasan, Konsistensi dan Koordinasi) sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan BLBU ini, 2) Aspek Sumber Daya (SDM, Informasi, Wewenang dan Fasilitas), sebagian masih ada yang belum mendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas irigasi dan dana belum maksimal. Namun informasi, wewenang dan fasilitas berupa benih yang didistribusikan sudah sangat mendukung, 3) Aspek Sikap (Sikap Implementator, Dukungan Pimpinan, Insentif bagi pelaksana dan Transparansi ), sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan BLBU ini, dan 4) Aspek Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi), belum mendukung dalam pelaksanaan kebijakan BLBU ini.

## PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN BENIH BERMUTU VARIETAS UNGGUL MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pangkalpinang, 7 April 2013  
Yang Menyatakan



(Aprilogra)  
NIM.016758936

iv

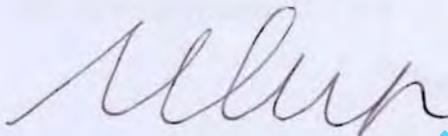
Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul Melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011

Penyusun TAPM : Aprilogra  
 NIM : 016758936  
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)  
 Hari/Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE.M.Si.Ak  
 NIP. 19661213993032003

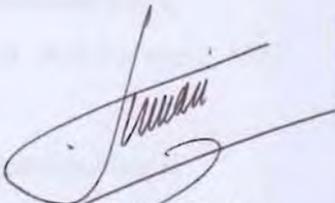


Dr. Adi Suryanto, M.Si  
 NIP. 196912081994031001

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan  
 Ilmu Politik/Program Magister  
 Administrasi Publik



Sucati, M.Sc, Ph. D  
 NIP. 19520213 198503 2 001




Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si  
 NIP. 19710609 199802 2 001

**PENGESAHAN**

NAMA : APRIOLOGRA  
NIM : 016758936  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
JUDUL TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN  
PENGUNAAN BENIH BERMUTU VARIETAS UNGGUL  
MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BENIH  
UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN BANGKA TAHUN  
ANGGARAN 2011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/7 April 2013  
Waktu : 11.45 WIB  
dan telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji :

Dr. Sofjan Aripin, M.Si

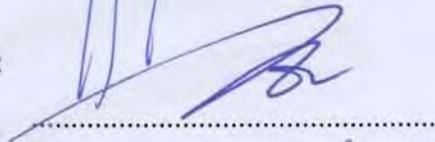
:



Penguji Ahli :

Dr. Liestyodono B.I, M.Si

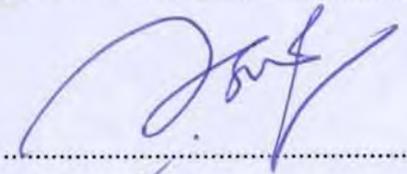
:



Pembimbing I :

Dr. Adi Suryanto, M.Si

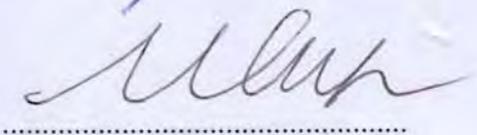
:



Pembimbing II :

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE. M.Si.Ak

:



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Unggul Bermutu Varietas Unggul Melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011" ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini terlaksana dengan dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Terbuka dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka serta Bapak Drs.Syarif Fadillah, M.Si selaku Kepala UPBJJ – UT Pangkalpinang.
2. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan TAPM ini.
3. Ibu Dr.I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE. M.Si.Ak sebagai Pembimbing II atas segala masukan dan pengarahan dalam penyusunan TAPM ini.
4. Bapak Dr. Liestyodono B.I, M.Si selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan penulisan sebuah karya tulis.
5. Gubernur dan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin penelitian di wilayah kerjanya dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Penerima BLBU yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Mak (Mashud Indan (Alm) dan Hj. Yuhana A.M) dan semua keluargaku terutama istriku tercinta, Ernawati, SP yang dengan tulus memberikan motivasi dan pengertiannya serta anak-anakku tersayang, Mariyah Najah Salsabillah, Jeehan Remyza Alya dan Raynor Alfarizi Taufiqurrahman yang telah menginspirasi.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Penelitian tentang program BLBU dengan menggunakan metode George C. Edwards III di Kabupaten Bangka ini merupakan penelitian pertama sekali dilakukan, untuk itu penulis menyadari sekali bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaannya dan perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti-peneliti yang lain. Akhirnya semoga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, pemerintah daerah khususnya Pemkab Bangka dan kita semua. Amin.

Pangkalpinang, April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstract.....	ii
Halaman Pernyataan .....	vi
Halaman Lembar Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>Bab I</b> <b>Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Signifikansi Studi .....	12
<b>Bab II</b> <b>Tinjauan Pustaka</b>	
A. Kajian Teoritik.....	18
1. Kebijakan Publik .....	18
2. Implementasi Kebijakan .....	22
3. Model Implementasi Kebijakan .....	26
4. Kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul .....	32
5. Tata Cara Penetapan Kelompok Tani Penerima dan Penyaluran BLBU .....	33
6. Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan .....	35
B. Konsep Kunci.....	36
C. Kerangka Berpikir .....	38

D. Pertanyaan Penelitian .....	40
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
A. Desain Penelitian .....	41
a. Metodologi Penelitian .....	41
b. Penentuan Lokasi Penelitian .....	42
c. Sasaran Penelitian .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Instrumen Penelitian .....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data .....	43
<b>Bab IV Temuan dan Pembahasan</b>	
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan .....	48
C. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) .....	57
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	107
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>109</b>

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	38
-------------------------------------	----

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Per Provinsi dan Per Komoditas Tahun Anggaran 2011.....	6
Tabel 1.2.	Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Per Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 .....	8
Tabel 4.1.	Realisasi Kelompok Tani Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/2086/Pernak/2011 tanggal 30 Juni 2011.....	58
Tabel 4.2.	Dukungan Peraturan/Landasan Hukum Terkait Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)188.46/2086/Pernak/2011 tanggal 30 Juni 2011.....	65
Tabel 4.3.	Hasil Analisis Tahap Implementasi Kebijakan ditinjau dari faktor Komunikasi. ....	73
Tabel 4.4.	Kualifikasi SDM di Bidang Pertanian Tahun 2011.....	75
Tabel 4.5.	Hasil Analisis Tahap Implementasi Kebijakan ditinjau dari faktor Sumber Daya .....	85
Tabel 4.6.	Hasil Analisis Tahap Implementasi Kebijakan ditinjau dari faktor Sikap/Disposisi.....	97
Tabel 4.7.	Hasil Analisis Tahap Implementasi Kebijakan ditinjau dari faktor Struktur Birokrasi .....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2. Sampel Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi Proses Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian sebagai bagian pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian maju, efisien dan tangguh serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi (Kementerian Pertanian, 2011).

Ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar di Indonesia. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan kelangsungan suatu kabinet pemerintahan atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Bahkan di banyak Negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan menjadi tambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), artinya di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar negeri. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri (Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, 2010)

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1996 tentang pangan, pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau”. UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002 dalam Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, 2010).

Seiring dengan kemajuan pertanian tanaman pangan, maka semakin besar pula tuntutan terhadap ketersediaan benih varietas unggul bermutu sebagai salah satu factor penentu keberhasilan produksi tanaman pangan. Tuntutan peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian merupakan konsekuensi logis yang timbul dari perubahan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan ini juga tersirat dalam program utama pembangunan pertanian di Indonesia yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri.

Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan mengacu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu teknologi yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan mutu produk adalah penggunaan varietas unggul bermutu secara konsisten. Dengan demikian benih varietas unggul bermutu padi, jagung dan kedelai sebagai komoditas tanaman pangan

utama harus tersedia dalam kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang cukup (Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, 2012).

Sampai saat ini kondisi perbenihan kita belum mampu menyediakan benih sesuai dengan kebutuhan konsumen secara tepat. Pemulia tanaman telah banyak menciptakan berbagai varietas unggul akan tetapi benih baru akan dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen jika tersedia dalam skala komersial, sesuai dengan preferensi konsumen. Untuk mencapai maksud tersebut, maka program-program pengembangan perbenihan diarahkan pada optimalisasi sistem perbenihan yang meliputi optimalisasi dukungan dalam pengembangan varietas baru, produksi dan distribusi benih sumber dan benih sebar, pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta optimalisasi kelembagaan produksi dan sertifikasi benih (Kementerian Pertanian, 2010)

Penggunaan benih unggul bermutu terbukti dapat memberikan berbagai keuntungan, karena selain dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil juga akan menekan biaya produksi. Sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu sistem budidaya tanaman akan dikembangkan dengan berazaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan.

Program pengembangan perbenihan tanaman pangan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu dalam jumlah, varietas, mutu, waktu, harga dan lokasi yang tepat bagi petani. Penggunaan benih

varietas unggul bermutu diyakini dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan indeks pertanaman dan mutu hasil (Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, 2010)

Kontribusi penggunaan benih bermutu varietas unggul dalam meningkatkan produktivitas dan produksi bahkan mutu hasil telah terbukti secara signifikan, antara lain dengan keberhasilan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan yang terjadi selama ini, hal ini sesuai hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Penerapan Panca Usahatani, Luas Areal Tanam dan Jenis Varietas Benih Padi terhadap Produksi dan Pendapatan Anggota Kelompok Tani di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan oleh Ratna Dewi, Effendi, Trully Gultom bulan April 2010 yang menyatakan bahwa Secara tunggal jenis varietas benih padi mempengaruhi produktivitas padi pada taraf nyata 99%”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul merupakan syarat keharusan bagi peningkatan ketahanan pangan nasional disamping penyediaan sarana produksi lainnya.

Program BLBU ini sangat baik untuk diterapkan dalam rangka membantu petani dalam memenuhi kebutuhan benih unggul bermutu. Sedangkan benih yang ada pada masyarakat petani Kabupaten Bangka adalah benih lokal, sehingga dari segi produktivitas masih rendah. Khususnya untuk Kabupaten Bangka, program ini sangat membantu sekali bagi petani dalam pemenuhan kebutuhan benih unggul, karena kabupaten Bangka belum mampu untuk memproduksi benih sendiri, sehingga harus mendatangkan benih dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera selatan dan Lampung.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk, ditujukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam rangka peningkatan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan mendukung upaya peningkatan produktivitas maupun produksi padi, jagung dan kedelai pada musim tanam (MT) 2011 dan MT 2011/2012. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka pada tahun 2011, melalui dana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan dan menyalurkan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada periode April sampai dengan Desember 2011.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa Program Bantuan Langsung Benih Unggul adalah upaya untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya pertanian padi dan palawija serta mengantisipasi kondisi iklim ekstrim yang dapat mengganggu produksi pangan. Program Bantuan Langsung Benih Unggul ini merupakan program yang sudah berjalan dari tahun anggaran 2009 sampai dengan sekarang. Program Bantuan Langsung Benih Unggul ini bertujuan untuk : 1) meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul; 3) meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : 1) meningkatnya ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul; dan 3) meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai (Kementerian Pertanian, 2011).

Menurut Kementerian Pertanian (2011), jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 meliputi benih padi non hibrida sebanyak 55.000.000 kg, benih padi lahan kering sebanyak 8.750.000 kg, benih padi hibrida sebanyak 1.303.935 kg, benih jagung hibrida sebanyak 3.100.950 kg dan benih kedelai sebanyak 12.000.000 kg. Sedangkan alokasi benih untuk setiap provinsi sesuai dengan usulan masing-masing provinsi dinyatakan pada table berikut :

Tabel 1.1. Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Per Provinsi dan Per Komoditas Tahun Anggaran 2011.

No.	Provinsi	Padi Non Hibrida				Padi Hibrida		Jagung Hibrida		Kedelai	
		Sawah Irigasi		Lahan Kering		Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)
		Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)						
1.	NAD	95	2.375	1,8	45	3,3	49,5	1,615	24,225	28,3	1,132
2.	SUMUT	120,271	3.006,775	8,5	212,5	4,5	67,5	12,375	185,625	5,266	210,640
3.	SUMBAR	92,790	2.319,750	9,910	247,750	-	-	15,997	239,955	1	40
4.	RIAU	27,972	699,3	8,5	212,5	0,950	14,250	0,675	10,125	3,1	124
5.	JAMBI	61,975	1.549,375	13,980	349,5	1,5	22,5	1,041	15,615	2,404	96,160
6.	SUMSEL	139,750	3.493,750	13	325	10,5	157,5	3,585	53,775	5,3	212
7.	BENKULU	35,680	892	7,715	179,375	0,8	12	1,905	28,575	-	-
8.	LAMPUNG	178,525	4.463,125	12	300	2,5	37,5	13,620	204,3	6,2	248
9.	BABEL	4,150	103,750	2,3	57,5	-	-	-	-	-	-
10.	KEPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	DKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	JABAR	138,125	3.453,125	27,4	685	2,750	41,250	10,695	160,425	16,020	640,8
13.	JATENG	163,804	4.095,1	27,1	677,5	5,3	79,5	32,640	489,6	49,770	1.990,8

14.	DIY	50,63 3	1.265, 825	35,5	887,5	0,8	12	1,8	27	7,1	284
15.	JATIM	134,5 75	3.364, 375	36,55 0	913,7 50	16,1 69	242,535	38,45 0	576,7 50	106,6 10	4.264, 4
16.	BANTEN	37,4	935	11,42 5	285,6 25	1,58 0	23,7	255	3,825	2,530	101,2
17.	BALI	40	1.000	-	-	2	30	-	-	4,5	180
18.	NTB	71,47 5	1.786, 875	15,75 0	393,7 50	-	-	11,35 7	170,3 55	30	1.200
19.	NTT	57,7	1.442, 5	22,37 5	559,3 75	8,73 0	130,950	11,4	171	1,3	52
20.	KALBAR	110,6 5	2.766, 25	18,25	456,2 5	3,1	46,5	3	45	1	40
21.	KATENG	26,8	670	19,5	487,5	0,3	4,5	0,45	6,750	3,1	124
22.	KALSEL	83,08 4	2.077, 1	9,05	226,2 5	-	-	1,704	25,56 0	0,684	27,36
23.	KALTIM	45,25 0	1.131, 25	13,6	340	2,5	37,5	-	-	1,5	60
24.	SULUT	34,2	855	10,45 0	261,2 50	7	105	9,705	145,5 75	-	-
25.	SULTENG	64	1.600	4,250	106,2 50	-	-	6	90	2	80
26.	SULSEL	251,7 62	6.294, 05	3,4	85	8	120	14,25 1	213,7 65	15	600
27.	SULTRA	50,10 1	1.252, 525	9,110	227,7 50	-	-	1,005	15,07 5	2,879	115,1 60
28.	GORONTA LO	25,57 8	639,45 0	-	-	3,7	55,5	10,30 5	154,5 75	1,637	65,48 0
29.	SULBAR	16,32 5	408,12 5	2,275	56,87 5	0,95	14,250	2,3	34,5	1	40
30.	MALUKU	11	275	4,15	103,7 50	-	-	0,6	9	0,3	12
31.	MALUT	8	200	2,2	55	-	-	-	-	0,7	28
32.	PAPUA BARAT	5,225	130,62 5	0,4	10	-	-	-	-	0,8	32
33.	PAPUA	18,2	455	0,1	2,5	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2.200</b>	<b>55.000</b>	<b>350</b>	<b>8.750</b>	<b>86,9 29</b>	<b>1.303,9 35</b>	<b>206,7 30</b>	<b>3.100, 950</b>	<b>300</b>	<b>12.00 0</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu provinsi yang mempunyai potensi untuk dikembangkannya pertanian tanaman pangan seperti padi sawah dan padi ladang, jagung dan kedelai. Namun yang masih menjadi kendala disini adalah kultur masyarakat yang ada masih terbiasa untuk membudidayakan tanaman

perkebunan seperti karet, sawit dan bekerja di Tambang-tambang Inkonvensional (TI) dengan anggapan lebih cepat menghasilkan uang dan jumlah yang didapat lebih banyak.

Kabupaten Bangka yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, merupakan salah satu kabupaten yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan benih unggul bermutu. Untuk memenuhi kebutuhan benih tersebut, Kabupaten Bangka masih mendatangkan pasokan benih dari luar seperti pulau Jawa dan Sumatera Selatan dan mengharapkan bantuan benih dari pemerintah, seperti program pemberian bantuan melalui Bantuan Langsung Benih Unggul.

Tabel 1.2. Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Per Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.

No.	Kabupaten/ Kota	Padi Non Hibrida				Padi Hibrida		Jagung Hibrida		Kedelai	
		Sawah Irigasi		Lahan Kering		Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)
		Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)	Luas Areal (Ha) (000)	Kebutuhan Benih (Kg) (000)						
1.	Bangka	15	0,6	10	0,4	-	-	-	-	-	-
2.	Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bangka Selatan	78,75	3,15	25	1	-	-	-	-	-	-
4.	Belitung Timur	10	0,4	2,5	0,1	-	-	-	-	-	-
5.	Bangka Barat	-	-	12,5	0,5	-	-	-	-	-	-
6.	Bangka Tengah	-	-	7,5	0,3	-	-	-	-	-	-
7.	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>103,75</b>	<b>4,15</b>	<b>57,5</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah yang diharapkan dapat membawa dampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya petani yang terlibat dalam pertanian tanaman pangan. Adanya program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang salah satunya dialokasikan yang salah satu lokasinya di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya program ini sangat baik bagi masyarakat petani tanaman pangan di kabupaten Bangka, hal ini disebabkan karena belum berjalannya program produksi benih unggul secara mandiri di kabupaten Bangka. Pada program ini, benih yang diberikan secara gratis dengan demikian dari segi pembiayaan telah terjadi penghematan, namun dari hasil pelaksanaan program ini, hasil yang didapat belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap produktivitas yang dihasilkan masih belum optimal.

Namun hasil pelaksanaan program tersebut, menunjukkan produktivitas masih rendah, yaitu sebesar 2,2 ton/hektar, seperti yang terlihat dari laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang menyatakan bahwa produktivitas per hektar padi ladang maupun padi sawah rata-rata sebesar 22,49 kwintal/hektar (2,249 ton/hektar). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara penanaman padi sawah dan padi ladang menggunakan benih bermutu varietas unggul yang berasal dari BLBU dengan benih padi lokal yang digunakan petani setiap kali musim tanam. Seharusnya apabila kita menggunakan benih bermutu varietas unggul, hasil yang dicapai harus lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan produksi nasional sebesar 5 ton per hektar, sepertinya masih sangat tinggi selisih yang terjadi. Dari hasil

pelaksanaan program tersebut, peningkatan produktivitas masih dibawah 1 (satu) ton perhektar, sekitar 0,1-0,2 ton per hektar. Seharusnya apabila sudah menggunakan benih bermutu varietas unggul, kenaikan produktivitas yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) ton atau hampir mendekati potensi produksi sesuai dengan yang ada pada deskripsi pada tanaman tersebut.

Hasil yang belum optimal dari program ini disebabkan adanya berbagai masalah dalam implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), yakni: 1) Aspek kualitas SDM yang rendah dan kuantitas SDM yang ada tidak mencukupi atau kurang; 2) Aspek komunikasi yang tidak optimal sehingga sosialisasi kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan; 3) Struktur birokrasi atau kelembagaan yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka menjalankan program dan kegiatan; 4) Disposisi, sehingga kebijakan yang ada belum benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif pada masyarakat petani tanaman pangan (padi sawah dan ladang) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program ini merupakan program yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan Penggunaan Benih Unggul Bemutu yang erat kaitannya terhadap peningkatan produksi dalam suatu arel tanam secara keseluruhan dan produktifitas dalam suatu areal tanam per hektar dalam suatu budidaya tanaman. Keberhasilan Implementasi kebijakan ini akan mendapatkan hasil yang optimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik seperti irigasi, sumber pendanaan yang optimal (berkaitan dengan dana operasional untuk pembinaan oleh petugas dilapangan), sumber daya

manusia yang baik dari segi kuantitas dan kualitas, koordinasi yang baik antara pelaksana dilapangan, sikap dari implementator, pembagian tugas yang jelas dari masing-masing pelaksana, sehingga menurut peneliti pada implementasi kebijakan ini Teori Edwards III bisa digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan BLBU ini karena di dalam teori tersebut ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi satu kebijakan, yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Sikap/Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi.

Hasil dari penelusuran peneliti terhadap penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka baik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan metode Edwards III, belum ada peneliti yang melakukan penelitian yang sama terhadap penelitian yang dilakukan peneliti pada saat ini sehingga menjadikan peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program BLBU di Kabupaten Bangka ini menggunakan teori Edwards III.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul tanaman padi melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan

Benih Bermutu Varietas Unggul tanaman padi melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan terutama kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tanaman pangan.
2. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terhadap ilmu Administrasi Publik dibidang kajian Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 serta memberikan sumbangan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Signifikansi Studi**

Adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap Program Bantuan Langsung Benih unggul baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sangat berguna bagi penelitian berikutnya, karena hasil penelitian tersebut dapat menjadi suatu pembandingan bagi hasil penelitian berikutnya, apakah hasil penelitian sekarang sama atau berbeda hasilnya dengan penelitian terdahulu. Hasil dari penelusuran peneliti terhadap penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka dengan menggunakan teori Edwards belum ada

peneliti yang melakukan penelitian yang sama terhadap penelitian yang dilakukan peneliti pada saat ini.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap Implementasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), yaitu :

1. Artikel dengan Judul “Pengaruh Tingkat Penerapan Panca Usaha Tani, Luas Areal Tanam dan Jenis Varietas Benih Padi terhadap Produksi dan Pendapatan Anggota Kelompok Tani di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” oleh Dewi, et al. (2010)

Pada artikel tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat penerapan panca usahatani, luas areal tanam dan jenis varietas benih padi terhadap produksi padi.
2. Pengaruh tingkat penerapan panca usahatani terhadap produktivitas padi.
3. Pengaruh luas areal tanam terhadap produksi padi.
4. Pengaruh jenis varietas benih terhadap produktivitas padi.
5. Pengaruh produktivitas padi terhadap pendapatan petani.
6. Perbedaan antara tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan petani yang menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dengan petani yang tidak menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Secara bersama-sama tingkat perapan panca usahatani, luas areal tanam dan jenis varietas benih padi mempengaruhi produksi padi pada taraf nyata 99%.

2. Secara tunggal tingkat penerapan panca usahatani mempengaruhi produktivitas padi pada taraf nyata 99%.
3. Secara tunggal luas areal tanam mempengaruhi produksi padi pada taraf nyata 99%.
4. Secara tunggal jenis varietas benih padi mempengaruhi produktivitas padi pada taraf nyata 99%.
5. Secara tunggal produktivitas padi mempengaruhi pendapatan petani pada taraf nyata 99%.
6. Produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan dari usahatani padi hibrida lebih besar dibandingkan dengan produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan dari usahatani padi nonhibrida.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa varietas padi yang unggul berpengaruh terhadap produktivitas padi, yaitu sebesar 99 %.

2. Artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani : Kinerja dan Perspektif ke Depan” oleh Sembiring, et al. (2010)

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja dan perspektif kedepan implementasi kebijakan perberasan dalam Instruksi Presiden terhadap petani. Penelitian ini dilakukan di enam daerah lokasi sentra padi yang ada di kecamatan Sei Rempah, kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi, dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif, sebaliknya implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen gabah kering giling efektif. Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak efektif menyebabkan kelangkaan pupuk, pemupukan berimbang tidak tercapai dan biaya produksi yang dikeluarkan petani meningkat, dan membuka kemungkinan terjadinya konversi lahan sawah, sehingga tujuan perberasan tidak tercapai.

Upaya pencapaian tujuan kebijakan perberasan yang efektif, sebaiknya pemerintah memberikan BLBU kepada petani minimal 25 kg per hektar dan memfasilitasi pendistribusiannya melalui KUPD/PPL, sehingga menimbulkan rasa adil diantara kelompok tani. Pemerintah perlu melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pupuk bersubsidi, menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani tepat waktu, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan, mengusahakan harga gabah lebih tinggi dari HET pupuk bersubsidi, meneruskan kebijakan pupuk bersubsidi, dan meningkatkan status PPL harian menjadi pegawai tetap (PNS).

Upaya lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan pembangunan irigasi dan perbaikan system jaringan irigasi, melakukan pembelian langsung gabah petani, dan memfasilitasi pembentukan Koperasi petani di tingkat desa atau kelompok tani.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, adanya hubungan yang erat antara penggunaan benih unggul bermutu yang diberikan kepada petani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul dengan pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi. Hal ini menandakan bahwa diantara tiga faktor tadi, tidak bisa dipisahkan dalam rangka upaya untuk meningkatkan produktifitas padi di tingkat petani.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua artikel di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh yang sangat nyata antara penggunaan benih padi varietas unggul dengan produktivitas padi. Analisa ini dilakukan berdasarkan produksi yang dicapai per satuan luas (Ha) dan analisa dilakukan bersifat kuantitatif, bukan berdasarkan analisa kualitatif menurut teori Implementasi Kebijakan,
2. Adanya hubungan erat antara fasilitas irigasi, benih unggul dan pupuk dalam upaya meningkatkan produktivitas padi petani. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, namun tidak disebutkan teori apa yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Dari kedua kesimpulan yang telah diuraikan di atas menunjukkan analisa yang dilakukan bukan menggunakan teori Edwards III yang mengkaji masalah aspek Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pada penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul tanaman padi melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011 menggunakan teori Edwards III, bermaksud untuk memperoleh penjelasan tentang

keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan BLBU yang dilaksanakan di kabupaten Bangka dengan permasalahan seperti : 1) aspek kualitas SDM yang rendah dan kuantitas SDM yang ada tidak mencukupi atau kurang; 2) Aspek komunikasi yang tidak optimal sehingga sosialisasi kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan; 3) Struktur birokrasi atau kelembagaan yang ada kurang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka menjalankan program dan kegiatan; 4) Disposisi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Edwards III dengan melihat 4 (empat) aspek yang ada di dalam teori tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Kebijakan Publik**

“Bridgeman dan Davis (2004:4-7) (dalam Suharto, 2008) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni :

1. Sebagai tujuan, artinya adalah kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.
2. Sebagai pilihan tindakan legal atau sah secara hukum, artinya adalah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
3. Sebagai hipotesis, artinya adalah kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa

bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.”

Sedangkan dalam Kismartini (2009 : 1.8 – 1.9), dinyatakan bahwa apabila diperhatikan dengan seksama terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah

Thomas R. Dye (1978) menegemukakan : kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.

Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil tindakan atau langkah penting yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu tindakan apapun merupakan suatu tindakan kebijakan public karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Sependapat dengan pendapat tersebut adalah Edwards III dan Sharkansky (1978) : kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera

ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”, sedangkan menurut Anderson (1969) : kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

- b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah

Laswell dan Kaplan (1956) : Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Easton (1965) : kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

- c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Anderson (1969) : kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Edwards III dan Sharkansky (1978) : kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Dari uraian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakakn publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.

Menurut Dye (1975) (dalam Kismartini, 2009 : 1.7), ada 3 (Tiga) hal yang menjadi kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu berikut ini :

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada yang menjadi sasaran (*target group*).

Selanjutnya menurut Winarno (2012, 1.36 – 1.37),, proses perumusan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- Fase Penyusunan Agenda

Dalam tahapan ini para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

- Fase Formulasi Kebijakan

Dalam tahap ini masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

- Adopsi Kebijakan

Dalam tahap ini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

- Implementasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia

- Penilaian Kebijakan

Dalam tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang ditentukan

Menurut Winarno (2007 : 21) bahwa sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep dirinci menjadi beberapa kategori, antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).

## 2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instansi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers*

untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Dalam literature administrasi Negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Politik, menurut Frank Goodnow yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh Negara. Ini berhubungan dengan dengan nilai keadilan dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Sedangkan administrasi, di pihak lain, berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh Negara. Administrasi berhubungan dengan pertanyaan fakta, bukan yang seharusnya. Konsekuensi dari pendapat di atas, administrasi memfokuskan perhatian pada mencari cara yang efisien, untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Anderson, 1969:93; Henry 1988:34, dalam Subarsono, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Fungsi utama implementasi adalah untuk mencapai atau mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan (*policy goals*), maka fokus utama implementasi adalah bagaimana mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Karena itu pendekatannya lebih bersifat *top down*. Implementasi hanyalah merupakan masalah otoritas dan hirarki dalam organisasi. Implementasi kemudian dianggap hanyalah masalah mengurangi distorsi komunikasi.

Lester and Stewart (2000 : 104) dalam Winarno (2012 : 147), bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Tahap implementasi kebijakan berarti kebijakan yang telah diambil atau diputuskan dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu yang selanjutnya akan memobilisir dukungan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, teknologi, finansial, informasi, peralatan dan sebagainya. Namun masalahnya tidak sesederhana itu, banyak isu yang muncul pada tahap implementasi kebijakan, misalnya konflik kepentingan, koordinasi, alokasi sumber daya, pertukaran informasi, kejelasan otoritas dan sebagainya.

Darwin (1995) menyatakan bahwa setelah suatu kebijakan dirumuskan maka pencapaian tujuan atau target kebijakan tersebut akan dicapai menjadi proses implementasi yakni serangkaian kegiatan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan semua keputusan yang diambil. Proses implementasi seringkali disebut sebagai kotak hitam (*black box*) yang sering tidak transparan tetapi secara pasti menjadi *variable* antara yang menentukan proses transformasi dari tujuan dalam target kebijakan ke hasil-hasil kebijakan.

Proses implementasi merupakan *delivery mechanism* untuk memastikan *output* atau keluaran-keluaran kebijakan sampai pada *beneficiaries* sehingga

suatu kebijakan dapat menghasilkan *policy outcomes* sebagaimana yang diharapkan. Memahami proses implementasi, yaitu compliance : berangkat dari pertanyaan apakah implementers mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan larangan-larangan yang dibuat (Ripley, 1986 : 11 dalam Supadmi, 2009).

Grindle (1980) memberikan pandangan dalam Winarno (2012 : 149) bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya Grindle (1980) memberikan pandangan dalam Subarsono (2010 : 93) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implentation*). Komponen yang termasuk ke dalam isi kebijakan adalah (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; dan (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Selanjutnya Van Meter dan van Horn (1975 : 447) dalam Winarno (2012 : 149)

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

### **3. Model Implementasi Kebijakan**

Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Menurut Subarsono, (2010 : 89), keberhasilan kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa model yang berhubungan dengan implementasi kebijakan seperti : model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondinelli (1983), David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999).

Pada penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kebijakan program ini, peneliti menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980) dalam Winarno (2012 : 177), studi implementasi kebijakan adalah *krusial* bagi *public administration* dan *public policy*. Dalam mengkaji implementasi kebijakan Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan : prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan itu dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Keempat faktor atau variabel ini harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Variabel-variabel yang dimaksud oleh Edwards III tersebut adalah :

1. Komunikasi (*Communications*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Sikap (*Dispositions/Attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Uraian pada masing-masing faktor tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communications*)

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Karenanya tidak ada variabel tunggal dalam proses

implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementors kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui

tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

### 3. Sikap (*Dispositions/Attitudes*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud

dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter (1975) menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

#### **4. Kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul**

Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15/Permentan/SR.120/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul disebutkan bahwa Bantuan Langsung Benih Unggul adalah suatu upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada Pelaksanaan peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul disebutkan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Bantuan Langsung Benih Unggul yang selanjutnya disebut BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai bantuan pemerintah yang diberikan secara gratis kepada petani melalui kelompok tani yang telah ditetapkan.
- b. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan BLBU.
- c. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, bimbingan teknis dan pelaporan kegiatan BLBU.
- e. Badan Usaha Milik Negara Penyedia dan Penyalur BLBU TA.2011 adalah PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT.Pertani (persero).

## **5. Tata Cara Penetapan Kelompok Tani Penerima dan Penyaluran BLBU**

Bantuan Langsung Benih Unggul adalah merupakan bantuan benih bagi petani dengan ketentuan bahwa benih yang dibagikan tersebut merupakan benih yang bersertifikat. Benih yang bersertifikat tersebut di tandai dengan adanya label

pada kemasan benih tersebut. Sedangkan tata cara penetapan kelompok tani penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program BLBU kepada Dinas Pertanian Provinsi, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
- b. Kelompok tani mengajukan permohonan BLBU yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian Setempat, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih yang meliputi jumlah, varietas, jadwal tanam serta lokasi.
- c. Permohonan BLBU kelompok tani selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
- d. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Rekapitulasi dan data kelompok tani (CPCL) dari kecamatan selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani penerima BLBU dalam bentuk Keputusan dan selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

- f. Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani calon penerima BLBU yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah melalui proses verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan CPCL berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
  - g. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana pada butir 6 tersebut diatas, selanjutnya disampaikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) setempat, sebagai dasar penyaluran bantuan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero), kepada kelompok tani yang telah ditetapkan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
  - h. Kebenaran dokumen CPCL, dokumen penyaluran dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sampai ke titik bagi kelompok tani, menjadi tanggungjawab PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta Dinas Pertanian Provinsi.
- 6. Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Serta Pelaporan**

Agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dapat tepat tujuan dan tepat sasaran, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut yang terdiri dari :

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten yang menerima bantuan,

- b. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Benih Unggul di kabupaten penerima bantuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Benih Unggul yang terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- d. Pelaporan hasil kegiatan yang meliputi laporan realisasi penyaluran benih, realisasi tanaman, realisasi panen dan permasalahan yang ada dilapangan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Benih Unggul antara lain adalah :

- a. Terwujudnya ketahanan pangan padi (lahan sawah dan lahan kering), dan
- b. Tercapainya produktivitas dan produksi padi (lahan sawah dan lahan kering).

## **B. Konsep Kunci**

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang pada bab pendahuluan, di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa Program Bantuan Langsung Benih Unggul adalah upaya untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya pertanian padi dan palawija serta mengantisipasi kondisi iklim ekstrim yang dapat mengganggu produksi pangan. Program Bantuan Langsung Benih Unggul ini bertujuan untuk : 1) meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul; 3) meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : 1) meningkatnya ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul;

dan 3) meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai (Kementerian Pertanian, 2011).

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Alasan digunakan teori ini adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam implementasi program BLBU ini, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- 1) harus adanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan antara sesama pelaksana kebijakan di lapangan;
- 2) harus didukung oleh sumberdaya yang memadai dan mengerti tentang tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan ini;
- 3) harus adanya penerimaan yang baik dari pelaksana kebijakan, sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berkaitan erat dengan disposisi/karakter dari implementator; dan
- 4) harus adanya struktur birokrasi yang baik, hal ini berkaitan erat dengan garis komando antara atasan kepala dinas dengan bawahannya.

Dengan adanya uraian tersebut di atas, maka peneliti beranggapan bahwa teori Edwards III ini cocok untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



Sumber : George C. Edwards III (1980)

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

#### Penjelasan :

##### 1. Komunikasi.

Pada suatu implementasi kebijakan, komunikasi yang baik sangat diperlukan sehingga apa yang harus dilakukan oleh implementator dapat dipahami dengan baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi ini adalah:

- a. Transmisi, berkaitan dengan proses penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kebijakan sesuai keinginan dari pembuat kebijakan.
- b. kejelasan, apabila informasi tentang pelaksanaan kebijakan ini disampaikan dengan jelas maka tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik.
- c. Konsistensi, Jadi pelaksana kebijakan harus konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh pembuat kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan pembuat kebijakan melalui pedoman-pedoman yang disampaikan.
- d. Koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan koordinasi yang baik antara sesama pelaksana kebijakan di lapangan.

## 2. Sumber Daya.

Sumber Daya yang baik sangat berguna sekali bagi pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Pada aspek Sumber Daya ini, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh SDM yang mencukupi baik dari segi Kuantitas maupun kualitas SDM tersebut. Kuantitas SDM menunjukkan bahwa berapa banyak jumlah staf yang ada dalam suatu organisasi tersebut untuk dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan, sedangkan kualitas SDM menunjukkan bahwa seberapa besar SDM tersebut mengerti tentang kebijakan yang dijalankan tersebut.
- b. Informasi, harus ada informasi yang akurat dan terarah tentang pelaksanaan kebijakan ini agar dapat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yang ada.
- c. Wewenang, harus ada pemberian wewenang yang penuh kepada pelaksana kebijakan, agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, misalnya Kepala Dinas/Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.
- d. Fasilitas, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut harus dipenuhi/dilengkapi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar, misalnya fasilitas irigasi dan dana operasional untuk pembinaan di lapangan.

## 3. Sikap/Disposisi.

Tanggapan yang positif terhadap suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan akan menjadi sesuatu yang positif untuk pencapaian terhadap suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam suatu implementasi suatu kebijakan. Pada aspek Sikap/Disposisi ini, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Sikap implementator, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan untuk dapat mensukseskan kebijakan tersebut.
- b. Dukungan Pimpinan, hal ini sangat diperlukan sekali dalam implementasi suatu kebijakan, apabila ada suatu dukungan yang kuat dari pimpinan maka pelaksanaan suatu kebijakan akan lebih mantap, misalnya dukungan pimpinan dalam bentuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut.
- c. Insentif bagi pelaksana, Insentif bagi pelaksana kebijakan perlu diberikan supaya pelaksana kebijakan lebih termotivasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Transparansi, hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat dapat mengganggu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, misalnya perlu dibuat laporan rutin tentang perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi.

Hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan karena pada saat suatu kebijakan dilaksanakan harus ada bagian-bagian khusus yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengkhususan bagian ini dimaksud supaya perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan itu akan lebih fokus dan tidak terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan lain dalam suatu bidang. Oleh sebab itu di dalam struktur birokrasi terdapat SOP dan fragmentasi supaya yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan jelas dan tidak saling melempar tanggungjawab oleh masing-masing pihak dalam organisasi tersebut.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Pada proses implementasi kebijakan ini dengan menggunakan model Edwards III, beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan BLBU ini adanya suatu komunikasi yang baik antara sesama implementator.
2. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan BLBU ini, aspek sumberdaya dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
3. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan BLBU ini aspek disposisi/ karakter implementator dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
4. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan BLBU ini aspek struktur birokrasi dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini

### **BAB III**

## METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

#### 1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan kepada gejala, fakta atau informasi sosial. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat (Bungin, 2007 : 69). Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif pada penelitian mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai setting yang aktual, penelitian adalah instrumen kunci. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui informan kunci (*key informan*) dan analisis data skunder. Informan adalah orang yang memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai data yang diperlukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Data bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis datanya bersifat induktif dan pemaknaan tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1998 dalam Supadmi, 2009). Penelitian kualitatif menurut Dimiyati (1997) dalam Supadmi (2009), adalah peristiwa sosial selain itu karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*).

Lebih peka terhadap informal-informal yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Lofland dan Losland (Maleong, 2000) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka.

## 3. Sasaran Penelitian

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.
- b. Masyarakat petani sebagai penerima BLBU.

## B. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan implementasi program maka informan yang dipilih adalah pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah Bidang Pertanian yang dijadikan sumber pengumpulan data dan pengetahuan permasalahan penelitian yang akan di kaji, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait di Kabupaten Bangka.

Informan yang dapat mewakili sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksana Penentu Kebijakan di Kabupaten Bangka: Kepala Dinas Pertanian / Kepala Bidang Pertanian di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang terkait dengan pelaksana program.
- b. Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka yang terkait dengan pelaksana program.

- c. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai petugas lapangan.
- d. Ketua Kelompok Tani penerima.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari informan di lapangan yang mengetahui tentang implementasi program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka. Data tersebut diperoleh melalui wawancara maupun dari pengamatan langsung ke lapangan.

b. Data Skunder

Data ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari instansi/lembaga terkait, laporan-laporan, data kepegawaian, data finansial dan lain-lain.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini :

▪ Pedoman Wawancara

Merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, tanya jawab dilakukan secara bebas namun terarah. Menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait.

- Literatur, yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data tentang laporan hasil pelaksanaan kegiatan, personil-personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kondisi topografi lahan yang ada di kabupaten tersebut dan data tentang struktur organisasi kelembagaan sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

*Lofland dan Lofland* (Moleong, 2000) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data proses penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yaitu: proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*).

*Getting in*, dalam tahap ini peneliti membawa izin formal sebagai bukti peneliti benar-benar akan mengadakan penelitian memasuki lokasi penelitian yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Karena peneliti adalah pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dalam melebur dan pembauran dapat dilaksanakan dengan latar belakang penelitian secara baik. Melakukan hubungan yang simpatik dan etik kepada informan sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan. Selain itu lokasi lain adalah kantor lembaga/instansi terkait serta ke masyarakat.

*Getting along*, peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan subyek penelitian, mencari informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan berupaya menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.

*Logging the data*, pada tahap ini peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu : melalui wawancara dan teknik dokumentasi.

#### E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan program BLBU tersebut di lapangan. Data-data yang dihasilkan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III (1980) dalam bentuk uraian dan tabel. Analisis dilakukan berdasarkan 4 (empat) aspek yang ada, seperti :

- 1) harus adanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan antara sesama pelaksana kebijakan di lapangan;
- 2) harus didukung oleh sumberdaya yang memadai dan mengerti tentang tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan ini;
- 3) harus adanya penerimaan yang baik dari pelaksana kebijakan, sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berkaitan erat dengan disposisi/karakter dari implementator; dan
- 4) harus adanya struktur birokrasi yang baik, hal ini berkaitan erat dengan garis komando antara atasan kepala dinas dengan bawahannya.

## B A B IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Pembentukan Kabupaten Bangka ditetapkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), dan merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan. Penetapan Kota Sungailiat sebagai Ibukota Kabupaten Bangka didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971 tanggal 19 Februari 1971. Namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka menjadi salah satu Kabupaten dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dan secara administratif berbatasan dengan Laut Natuna di sebelah utara, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang di sebelah selatan, dengan Kabupaten Bangka Barat di sebelah barat, serta berbatasan dengan Selat Karimata di sebelah timur. Secara geografis terletak pada  $1^{\circ}20'$  -  $3^{\circ}07'$  Lintang Selatan dan pada  $105^{\circ}$  -  $107^{\circ}$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bangka mempunyai luas sebesar  $2.950,68 \text{ km}^2$  atau  $295.068 \text{ Ha}$ , dengan luas daratan sebesar  $11.534,1 \text{ km}^2$  dan sisanya merupakan daerah perairan. Luas areal untuk penggunaan di sector Pertanian dan Peternakan yaitu : 1) Pertanian Tanaman Pangan seluas  $35.844 \text{ Ha}$  dan 2) Peternakan seluas

3.799 Ha. Wilayah pengembangan Pembangunan Pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif dan sangat potensial yaitu : 1) Tanaman pangan di Kecamatan Merawang, Riau, Silip, Mendo Barat dan Puding Besar, dan 2) Peternakan di Kecamatan Sungailiat, Mendo Barat dan Merawang.

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata dibawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti pasir kuarsa, kaolin, batu gunung. Bentuk dan keadaan tanahnya meliputi : 1) 4% berbukit seperti Gunung Maras, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dengan jenis tanah perbukitan tersebut adalah kompleks podsolik coklat kekuning-kuningan dan Litosol yang berasal dari batu Plutonik masam, 2) 51 % berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks Batu pasir keorsit dan batuan Plutonik masam, 3) 20 % berubah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Aluvial Hedrimorf dan Glei Humus serta negosol kelabu muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2008 sebesar 241.870 jiwa sehingga daerah ini memiliki kepadatan penduduk kira-kira 15,75 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Bangka ini berjumlah 62.631 dan bisa diasumsikan bahwa rata-rata terdapat 3,9 jiwa dalam setiap rumah tangga. Kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 67.695 jiwa, sedangkan Kecamatan Bakam merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 14.871 jiwa. Proporsi penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya (51,6%) dibandingkan dengan proporsi penduduk berjenis kelamin perempuan (48,4%) dengan rasio jenis kelamin sebesar

106,6. Proporsi penduduk menurut kelompok umur menempatkan golongan usia produktif (15 – 44 tahun) sebagai jumlah paling besar yaitu 52% sedangkan proporsi terkecil ada pada golongan umur < 1 tahun sebesar 2%. Pada tahun 2008, penduduk Kabupaten Bangka ini tersebar di 62 desa dan 7 kelurahan yang berada di 8 Kecamatan yaitu Sungailiat, Baturusa, Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, Belinyu, Riau Silip dan Bakam.

Kabupaten Bangka beriklim Tropis Tipe A dengan variasi curah hujan antara 72,2 hingga 410,2 mm tiap bulan, suhu rata-rata daerah Kabupaten Bangka berdasarkan stasiun meteorology Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 25,7°C sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 78 hingga 87 %. Sementara intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 19,0; 57,3% dengan tekanan udara antara 1008,9 hingga 1010,9 mb.

#### **B. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan**

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka adalah salah satu Dinas yang melaksanakan fungsi teknis dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka. Dinas Pertanian dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor seri D) dan selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis kebijakan daerah serta desentralisasi di bidang Pertanian dan Peternakan, serta melaksanakan fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya meyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 mempunyai visi yang diselaraskan dengan Grand Strategy Pemerintah Kabupaten Bangka menuju Visi “Bangka Idaman” yakni “Terwujudnya Masyarakat Pertanian dan Peternakan” yang Produktif, Inovatif, Mandiri, sejahtera melalui Pembangunan Pertanian dan Peternakan Berbasis Kewilayahan dan Berdaya Saing”.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka telah menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) Pertanian dan Peternakan.
2. Membangun Infrastruktur Pertanian dan Peternakan yang handal.
3. Mewujudkan Aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan yang amanah.
4. Mengelola Sumber Daya Alam Pertanian dan Peternakan secara optimal.
5. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat dibidang Pertanian dan Peternakan.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menekan tingkat mortalitas pada ternak pada ternak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat Veteriner (Kesmavet).

2. Meningkatkan Populasi Ternak.
3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru di bidang Pertanian dan Peternakan.
4. Melaksanakan pembangunan di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai tata ruang wilayah yang berbasis agropolitan.
5. Melaksanakan pembangunan sentra ekonomi di Bidang Pertanian dan Peternakan yang handal.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas di bidang Pertanian dan Peternakan secara aman, tertib dan damai.
7. Meningkatkan kompetensi Aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta reward dan punishment sesuai dengan kinerjanya.
8. Menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan di bidang Pertanian dan Peternakan secara terintegrasi, on-line dan tepat waktu berdasarkan data yang up-to date serta akurat.
9. Meningkatkan pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan SOP dengan administrasi yang transparan dan akuntabel.
10. Mengoptimalkan pengelolaan SDA Pertanian dan Peternakan dengan cara dipetakan, dikembangkan dan dipromosikan secara on-line dengan basis data yang up to date dan akurat.
11. Mengoptimalkan pengelolaan SDA Pertanian dan Peternakan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan ramah lingkungan.

12. Mengoptimalkan pengelolaan limbah Pertanian dan Peternakan menjadi produk yang bernilai ekonomi.
13. Menumbuhkembangkan kelompok usaha tani-ternak yang produktif dan meningkatkan produktifitas kelompok usaha tani ternak dalam memajukan ekonomi desa.
14. Menumbuhkembangkan keragaman komoditas unggulan Pertanian dan Peternakan di setiap Kecamatan yang mendayagunakan benih/bibit, teknologi produksi dan kemasan yang unggul serta pemasaran dan kontinuitas produksi terjamin.
15. Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di setiap Kecamatan yang mampu menjamin pembiayaan petani dalam berusaha tani-ternak.
16. Menumbuhkembangkan pasar di setiap Kecamatan yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan input produksi Pertanian dan Peternakan dengan harga terjangkau serta mampu memfasilitasi penjualan komoditas pertanian dan peternakan di wilayah (Spesifik Lokalitas).
17. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan lokal di bidang pertanian dan peternakan dalam rangka swasembada pangan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam periodeisasi tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya yang ada. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang

namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka menetapkan sasaran dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase desa/kelurahan yang bebas penyakit zoonosis di 69 desa/kelurahan sebesar 50 %.
2. Meningkatnya jumlah wirausaha di bidang Pertanian dan Peternakan di setiap Kecamatan sebanyak 1 (satu) kelompok.
3. Meningkatnya persentase pembangunan pertanian dan peternakan sesuai tata ruang sebesar 10 %.
4. Menekan persentase penurunan konversi lahan pertanian sebesar 100 %.
5. Meningkatnya persentase sawah yang terairi secara kontinyu.
6. Meningkatnya persentase sawah yang memiliki jalan usaha tani sebesar 10%.
7. Meningkatnya persentase sentra ekonomi pertanian yang memiliki UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) 1 (satu) unit tiap tahun.
8. Meningkatnya jumlah RPH yang memiliki sarana pengelolaan limbah sanitasi dan drainase sebanyak 3 (tiga) unit.
9. Menurunnya persentase pelanggaran disiplin pegawai.
10. Meningkatnya persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
11. Meningkatnya persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
12. Meningkatnya persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

13. Meningkatnya jumlah potensi bidang pertanian dan peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
14. Menurunnya persentase lahan tidur yang dimanfaatkan untuk Pertanian dan Peternakan.
15. Meningkatnya persentase limbah pertanian dan Peternakan yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
16. Meningkatnya persentase kelompok usaha tani yang produktif.
17. Meningkatnya produksi/produktifitas komoditas unggulan Pertanian dan Peternakan.
18. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka tahun 2009-2013 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
4. Program Peningkatan Kesejahteraan petani.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyakit Ternak.
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan.
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian.
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
16. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan.
17. Program Pengembangan Agribisnis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tanggal 8 September 2008, susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pertanian, membawahi :
  - a. Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani
  - b. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian
  - c. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran.
4. Bidang Peternakan, membawahi :
  - a. Seksi Produksi, Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan.
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

- c. Seksi Pemasaran dan Pasca Panen Peternakan.
5. Bidang Bina Program, membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Program.
  - b. Seksi Data Statistik.
  - c. Seksi Evaluasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
- a. UPTD Balai Benih Utama Petaling
  - b. UPTD Bioteknologi dan Genetika.
  - c. UPTD Balai Pembibitan Ternak
  - d. UPTD Pos Kesehatan Hewan.

Selanjutnya disebutkan juga dalam peraturan tersebut, bahwa Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan produksi pertanian, sarana dan prasarana, pengembangan lahan, perlindungan tanaman, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Bidang Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan produksi pertanian, sarana dan prasarana, pengembangan lahan, perlindungan tanaman, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian dan hortikultura.
2. Pengendalian produksi pertanian, sarana dan prasarana, pengembangan lahan, perlindungan tanaman, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian dan hortikultura.

3. Pengawasan produksi pertanian, sarana dan prasarana, pengembangan lahan, perlindungan tanaman, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian dan hortikultura.
4. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas masing-masing seksi yang terdapat dalam Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi pola pengembangan produksi, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian;
  - b. Melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumberdaya dan usaha pertanian
  - c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan modal usaha tani dan bimbingan usaha tani;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.
2. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, eksplorasi, konservasi, rehabilitasi dan pengolahan sumber daya pertanian;
  - b. Melaksanakan pola pengembangan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
  - c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi penggunaan pupuk, pestisida dan sarana pertanian lainnya;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.
3. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas :
    - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap pengamanan tanaman pertanian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha tani.
    - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengamanan terhadap pemakaian pestisida dan obat-obatan pertanian lainnya.
    - c. Melaksanakan rekayasa penanggulangan organism Pengganggu Tanaman (OPT).
    - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

### **C. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)**

Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian). Program Bantuan Langsung Benih Unggul ini merupakan program yang sudah berjalan dari tahun anggaran 2009 sampai dengan sekarang. Program Bantuan Langsung Benih Unggul ini bertujuan untuk : 1) meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul; 3) meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : 1) meningkatnya ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai; 2) meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul; dan 3) meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Pada pelaksanaan program BLBU ini ada tiga komoditi tanaman pangan yang dialokasikan yaitu; Padi, jagung, dan Kedelai. Untuk komoditi padi, terbagi menjadi

dua, yaitu padi ladang dan padi sawah. Untuk Kabupaten Bangka, komoditi yang menjadi pilihan pada program BLBU ini adalah padi ladang dan padi sawah. Hal ini disebabkan karena pertimbangan bahwa hasil yang didapat walaupun tidak dijual tapi mereka dapat mengkonsumsi sendiri.

Tabel 4.1. Realisasi Kelompok Tani Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/2086/Pernak/2011 tanggal 30 Juni 2011.

NO	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)	Varietas	Ket.
1.	Belinyu	Bintet	1. Cahaya	10	250	Situbage-ndit	Padi Ladang
			2. Berdikari	10	250	Situbage-ndit	Padi Ladang
		Gunung Pelawan	Tani Jaya	10	250	Situbage-ndit	Padi Ladang
		Bukit Ketok	Sejahtera	15	500	Situbage-ndit	Padi Ladang
		Lumut	Mega Lestari	20	500	Situbage-ndit	Padi Ladang
		Gunung Muda	Tunas Muda	10	250	Situbage-ndit	Padi Ladang
2.	Riau Silip	Banyu Asin	1. Sumber rezeki	10	250	Ciliwung	Padi Sawah
			2. Dampas Lestari	10	250	Ciliwung	Padi Sawah
			3. Jaya Makmur	10	250	Ciliwung	Padi Sawah
			4. Bina Karya	10	250	Ciliwung	Padi Sawah
			5. Tugu Mas	10	500	Ciliwung	Padi Sawah
		Pangkal Niur	1. Tunas Harapan I	25	625	IR-64	Padi Sawah
			2. Tunas Harapan II	25	625	IR-64	Padi Sawah
			3. Semubur I	12,5	312,5	IR-64	Padi Sawah

			4. Semubur II	12,5	312,5	IR-64	Padi Sawah
			5. Semubur III	12,5	312,5	IR-64	Padi Sawah
			6. Semubur IV	12,5	312,5	IR-64	Padi Sawah
			7.Suka Makmur	20	500	IR-64	Padi Sawah
			8.Suka MAkmur II	20	500	IR-64	Padi Sawah
		Berbura	Maras Senang	15	375	Tuwoti	Padi Ladang
		Riau	Mekar Sari II	20	500	Tuwoti	Padi Ladang
		Pugul	Rimba Raya	25	625	Tuwoti	Padi Ladang
		Cit	Subur Makmur	20	500	Tuwoti	Padi Ladang
3.	Pemali	Sempan	1. Maju Sejahtera	5	125	Tuwoti	Padi Ladang
			2. Kemelan	2	50	Tuwoti	Padi Ladang
			3. Angkop I	3	75	Tuwoti	Padi Ladang
		Penyaman	1.Dahlia	2	50	Tuwoti	Padi Ladang
			2. Tani Mandiri	3	75	Tuwoti	Padi Ladang
			3. Bina Karya I	2	50	Tuwoti	Padi Ladang
			4. Bina Karya II	3	75	Tuwoti	Padi Ladang
		Air Ruay	1. Suka Damai	3	75	Tuwoti	Padi Ladang
			2. Tekun	2	50	Tuwoti	Padi Ladang
		Pemali	1. Anggrek Permai	2	50	Tuwoti	Padi Ladang
			2. Harapan	3	75	Tuwoti	Padi Ladang
4.	Puding Besar	Puding Besar	1. Beringin II	10	250	Situbagedit	Padi Ladang
		Nibung	1.Makmur Jaya	10	250	Situbagedit	Padi Ladang

			2. Makmur Bersama	60	1500	Infari II	Padi Sawah
		Saing	1. Sejahtera Bersama IV	10	250	Situbagedit	Padi Ladang
			2. Sejahtera Bersama VI	10	250	Situbagedit	Padi Ladang
		Tanah Bawah	1. Mekar Sari IV	10	250	Situbagedit	Padi Ladang
			2. Mekar sari I sd IV	22	550	Infari II	Padi Sawah
		Kota Waringin	Bala Nipah	10	250	Situbagedit	Padi Ladang
		Labu	1. Rukun Makmur I	15	375	Infari II	Padi Sawah
			2. Rukun Makmur II	15	375	Ciliwung	Padi Sawah
5.	Merawang	Kimak	1. Redap Bahrin Lestari 1	8,5	212,5	IR-64	Padi Sawah
			2. . Redap Bahrin Lestari 2	19,5	487,5	IR-64	Padi Sawah
			3. Redap Bahrin Lestari 3	22	550	IR-64	Padi Sawah
			4. . Redap Bahrin Lestari 4	24	600	IR-64	Padi Sawah
			5. . Redap Bahrin Lestari 5	24	600	IR-64	Padi Sawah
			6. Redap Bahrin Lestari 6	22	550	IR-64	Padi Sawah
			7. Redap Bahrin Lestari 7	10	250	IR-64	Padi Sawah
			8. Redap Bahrin Lestari 8	10	250	IR-64	Padi Sawah
		Jada Bahrin	Tunas Harapan	40	1000	IR-64	Padi Sawah
6.	Bakam	Dalil	Suaka Tani	25	625	Situbagedit	Padi Ladang

		Neknang	Permata Hati	25	625	Situbagen- dit	Padi Ladang
7.	Mendo Barat	Mendo	1. Tri Jaya	10	250	Ciliwung	Padi Sawah
			2. Mawar Jaya	7,5	187,5	Ciliwung	Padi Sawah
			3. Mekar Jaya	7,5	187,5	Ciliwung	Padi Sawah
			4. Bukit Bare	20	500	Situbagen- dit	Padi Ladang
		Zed	1. Payak Riang	15	375	Ciliwung	Padi Sawah
			2. Memparik	15	375	Ciliwung	Padi Sawah
		Paya Benua	Panca Karya	20	500	Ciliwung	Padi Sawah
		Petaling	Petaling Makmur	25	625	Ciliwung	Padi Sawah
		Penagan	Setia	30	750	IR-64	Padi Sawah
		Cengkon g Abang	Maju Bersama	15	375	Situbagen- dit	Padi Ladang
	<b>Jumlah</b>			<b>947</b>	<b>23.675</b>		

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka 2011.

Dari tabel 4.1. diatas dapat diketahui bahwa dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, hanya tujuh kecamatan yang dialokasikan bantuan tersebut yaitu Belinyu, Riau Silip, Pemali, Puding Besar, Merawang, Bakam dan Mendo Barat sedangkan satu kecamatan, yaitu kecamatan sungailiat tidak dialokasikan bantuan tersebut.

Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Melalui program ini diharapkan adanya suatu peningkatan produktivitas padi, jagung dan kedelai dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Ketidakmampuan Kabupaten Bangka dalam memenuhi kebutuhan benih sendiri ini

disebabkan karena belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) penangkar yang handal yang dapat memproduksi benih unggul khususnya padi. Jadi dengan demikian benih yang mereka gunakan kalau tidak ada bantuan, mereka menggunakan benih lokal (benih yang berasal dari beberapa turunan benih tersebut), yang hal ini mengakibatkan produktivitasnya sangat rendah.

Bagi masyarakat Kabupaten Bangka, budidaya padi, baik padi ladang maupun padi sawah sudah lama dibudidayakan selain tanaman lada dan karet. Kalau dibandingkan dengan padi sawah, budidaya padi ladang lebih dominan dilakukan masyarakat dengan cara tumpang sari di sela-sela tanaman lada dan membuka lahan baru yang berasal dari tanaman karet yang sudah tua. Sedangkan padi sawah masih terbatas dengan lahan yang ada.

- **Analisa Kebijakan dengan Model Edwards III.**

Suatu kebijakan akan dapat dirasakan bermanfaat apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Secara teoritik, menurut Edwards III, ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi (*Communications*)**

Menurut Edwards, 3 hal penting yang perlu dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi.

1. Transmisi.

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui

apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Terkait dengan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan di Kabupaten Bangka telah memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini.

Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa,

*“Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan program BLBU ini melalui pemberian 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang pedoman umum dalam pelaksanaan program BLBU ini yang mencakup tujuan, sasaran, Spesifikasi Teknis, Lokasi dan kriteria penerima, penyaluran benih, monev dan laporan kegiatan BLBU) disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan dan diberikan juga pedoman teknis pelaksanaan kegiatan program BLBU”.*

Dari pendapat yang telah disampaikan di atas menyatakan bahwa dengan adanya pedoman umum tersebut, menggambarkan bahwa Kepala Bidang Pertanian yang dalam hal ini sebagai penerima langsung pelaksanaan program BLBU tersebut telah memahami secara mendalam tentang bagaimana seharusnya program BLBU ini dilaksanakan agar

tidak menyimpang dari tujuan dan sarana yang telah ditetapkan. Di dalam pedoman umum tersebut disebutkan : kriteria kelompok tani penerima, spesifikasi teknis benih yang diterima oleh petani, jumlah benih yang dialokasikan, tata cara penetapan kelompok tani penerima, tata cara penyaluran BLBU, realokasi benih, mekanisme penyaluran benih, waktu pelaksanaan, waktu penyaluran benih, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengawalan kegiatan yang meliputi monitoring kegiatan, pembinaan dan pendampingan, pelaporan dan sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ini.

## 2. Kejelasan.

Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan program BLBU, berarti pihak yang merumuskan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian harus memberikan penjelasan secara rinci tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan program BLBU ini. Berdasarkan hasil analisa dokumentasi, aturan-aturan mengenai pelaksanaan kebijakan telah dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011. Melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Permentan dan Pedum BLBU tersebut sudah disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten penerima BLBU, yang salah satunya adalah Kabupaten Bangka. Pedoman umum dan petunjuk teknis merupakan bagian penting dalam proses komunikasi, karena merupakan arahan kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Tabel 4.2 ini merupakan aturan-aturan yang dapat digunakan dalam implementasi program BLBU tahun 2011 di Kabupaten Bangka sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan adanya aturan-aturan ini pula informasi tentang pelaksanaan program BLBU dapat disampaikan dengan jelas.

Tabel 4.2 Dukungan Peraturan/Landasan Hukum Terkait Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

No.	Dukungan Peraturan/Landasan Hukum	Penerimaan Peraturan
1.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011	sudah
2.	Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011	sudah

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian, implementasi kebijakan program BLBU ini telah diterima oleh pelaksana di bidang pertanian dan telah dimengerti cukup jelas dan akurat mengenai maksud, tujuan dan sasaran dari program BLBU ini.

Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa,

*“Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan program BLBU ini melalui pemberian 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang pedoman umum dalam pelaksanaan program BLBU ini yang mencakup tujuan, sasaran, Spesifikasi Teknis, Lokasi dan kriteria penerima, penyaluran benih, monev dan laporan kegiatan BLBU) disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan dan diberikan juga pedoman teknis pelaksanaan kegiatan program BLBU”.*

Dan lebih lanjut beliau mengatakan:

*Sudah, Pemerintah Pusat telah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum dan saya rasa cukup jelas dengan adanya pedoman tersebut. Di dalam pedoman umum sudah memberikan pedoman tentang BLBU, yang meliputi tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi dan kriteria penerima, penyaluran benih.*

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Bidang Pertanian Kabupaten Bangka yang mengatakan bahwa,

*“Ya, saya mengenal adanya program BLBU. Informasi tentang program ini saya dapatkan dari Dinas Pertanian provinsi melalui sosialisasi yang dilakukan sebelum program ini berjalan.”*

Dari tabel 4.2 dan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pertanian dan Peternakan sudah cukup jelas dan dapat dipahami khususnya oleh pelaksana kebijakan yang ada di Bidang Pertanian, yaitu Kepala Bidang Pertanian dan Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani.

### 3. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, perintah tidak boleh bertentangan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan program BLBU di Kabupaten Bangka, perintah pelaksanaan yang diterima oleh pelaksana sudah cukup jelas dan tidak saling bertentangan. Semua pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kebijakan program ini sudah konsisten dengan perintah pelaksanaan baik tujuan maupun sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tidak ada suatu pernyataan dan tanggapan yang sifatnya bertentangan dengan pelaksanaan kebijakan program BLBU yang telah digulirkann oleh pemerintah ini, hal ini dapat diketahui dari tanggapan yang disampaikan oleh beberapa infoman yang ada, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan konsisten untuk melaksanakan program BLBU tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bangka,

*“Saya selaku Kepala Bidang Pertanian sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Terus terang saya katakan bahwa petani kami yang di Kabupaten Bangka ini sangat terbantu sekali dengan adanya program ini terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu yang tentunya bersertifikat. Memang kami akui bahwa di daerah kami belum ada petani penangkar yang bisa secara sendirinya memproduksi benih unggul yang bersertifikat. Jadi selama ini petani kami masih mengharapkan bantuan seperti ini. Selain program BLBU yang bersifat nasional ini, kami juga menganggarkan bantuan benih ini dari APBD Tingkat II dengan maksud agar produksi bisa meningkat dan petani kami merasa terbantu. Jadi kalau melihat dari tujuan yang ingin dicapai dari program ini, program ini sangat bagus dan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan saya selaku*

*Kepala Bidang Pertanian selalu konsisten untuk melaksanakan program ini.”*

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Bidang Pertanian berikut,

*“Kalau tanggapan instansi atau dinas pertanian dan peternakan dengan adanya program ini sangat baik dan menerima, hal ini dikarenakan sangat membantu petani dengan adanya program ini. Saya katakan baik karena Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini baik untuk dilaksanakan dalam rangka mengatasi kesulitan memperoleh benih unggul sesuai dengan kebutuhan petani dan wajib ikut serta mensukseskan Program BLBU sesuai dengan TUPOKSI Bina Produksi dan Usahatani.”*

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa pelaksana kebijakan sangat mendukung dan konsisten terhadap pelaksanaan program ini dan tanggapan yang disampaikan sangat positif dan tidak bertentangan dengan keinginan dari pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan program BLBU ini. Hal ini disebabkan karena program yang dilaksanakan tersebut merupakan program yang cukup baik dan sesuai dengan keadaan yang ada di Kabupaten Bangka dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dalam membantu petani dalam hal pemenuhan benih unggul.

#### 4. Koordinasi

Untuk mendukung program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini agar dapat diimplementasikan secara efektif, maka dibutuhkan suatu koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan program BLBU ini. Berdasarkan pengamatan di

lapangan, bahwa dinas terkait adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP) karena dalam struktur birokrasi di Kabupaten Bangka, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berada di dalam organisasi BKP, sedangkan untuk melakukan pengawasan di lapangan dan pembinaan dilapangan yang lebih banyak berhubungan langsung dengan pertanian adalah PPL.

Koordinasi dalam rangka implementasi kebijakan program BLBU telah terjalin cukup baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bangka,

*“koordinasi antar instansi terkait sudah cukup baik dan saling mendukung untuk pelaksanaan program BLBU ini di Kabupaten Bangka misalnya BKP, secara formal dilakukan pertemuan dengan instansi terkait yang dilaksanakan secara rutin baik di provinsi maupun di kabupaten.”*

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Bidang Pertanian berikut,

*“koordinasi antar instansi terkait sudah kami lakukan dengan dinas terkait, seperti Badan Ketahanan Pangan (BKP). Koordinasi tetap kami lakukan dengan instansi yang berkaitan dengan kegiatan ini, salah satunya adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP) kabupaten Bangka. Hal ini harus kami lakukan karena yang banyak berhubungan dengan petani di lapangan adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL) sedangkan PPL itu secara kedinasan berada di bawah BKP bukan dinas pertanian dan peternakan. Oleh karena itu koordinasi dengan BKP tetap kami lakukan, jangan sampai terjadi salah komunikasi tentang pelaksanaan program ini.”*

Sedangkan menurut beberapa PPL dan koordinator PPL yang berhasil diwawancarai mengatakan seperti berikut :

1. PPL Pugul, mengatakan bahwa informasi dan kejelasan tentang pelaksanaan program BLBU in telah mereka ketahui seperti yang mereka katakan :

*“saya kenal dan informasi ini kami dapatkan dari pihak dinas pertanian dan dari koordinator BPP dan setiap kali ada rapat di BPP, hal ini juga kami bicarakan tentang kesiapan dilokasi masing-masing”. dan*

*“Secara umum saya memahami program ini, dari tujuan dan sasarannya, semua itu sudah kami dapatkan penjealsannya dari pihak dinas pertanian dan BKP melalui koordinator BPP kami”.*

## 2. Koordinator PPL Pudingbesar,

*“Saya mengenal adanya program ini dari BKP dan Dinas Pertanian pada saat ada rapat di kabupaten bersama Dinas pertanian dan BKP.Jadi sampai saat ini informasi yang kami dapat tentang kegiatan ini masih cukup lancar dan jelas karena koordinasi setiap saat tetap kami lakukan”.dan*

*“Saya cukup paham dengan adanya program ini karena sudah ada penjelasan dari pihak dinas pertanian dan BKP.”*

## 3. PPL Pangkal Niur,

*“Saya mengenal adanya program BLBU ini, melalui ketika adanya sosialisasi program BLBU dari dinas pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Selain itu juga setiap rapat di BPP selalu melalui koordinator BPP membicarakan program BLBU tersebut”.dan*

*“Kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak dinas pertanian dan dari BKP melalui Koordinator BPP, kami dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dari proram bantuan benih ini. Kami selaku PPL di lapangan diminta untuk membina petani yang ada di wilayah kerja kami masing-masing.”*

## 4. PPL Berbura,

*“Kalau ditanyakan mengenai hal ini, saya mengenal adanya program BLBU ini dan informasi ini saya dapatkan dari hasil pertemuan kami selaku PPL dengan pihak Dinas Pertanian dan dari koordinator BPP dan Alhamdulillah paham karena ada penjelasan dari pihak dinas tentang pelaksanaan program BLBU.”*

## 5. PPL Banyu Asin,

*“Mengenal program ini semenjak jadi PPL. Informasi ini saya terima dari dinas pertanian dan melalui pertemuan rutin dari BKP di BPP dan Paham karena sebelumnya sudah ada penjelasannya, yaitu dinas pertanian tentang pelaksanaan program BLBU dan dari rapat-rapat di BPP dibicarakan juga tentang adanya program bantuan benih ini melalui BLBU.”*

Lebih lanjut dari pendapat beberapa ketua kelompok yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa informasi tentang adanya program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) mereka dapatkan langsung dari Penyuluh Pertanian Lapangan yang ada. Berikut ini pendapat dari ketua kelompok tani di desa Pangkal Niur tersebut :

*“Kami tahu adanya bantuan benih padi yang diberikan oleh pemerintah untuk kami dan kami semua sangat berterima kasih atas bantuan ini. Mudah-mudahan hasil padi kami lebih baik dengan adanya bantuan ini. Sebelum benih padi ini datang, terlebih dahulu kami telah dikasihtahu oleh PPL kami untuk dapat mempersiapkan tempat penampungan sementara sebelum benih tersebut dibagikan ke anggota kami masing-masing”.*

Sedangkan menurut ketua kelompok tani dari desa Banyu Asin mengatakan bahwa:

*“Kami sudah diberi tahu oleh PPL kami tentang adanya bantuan benih padi untuk kelompok tani, namun kami belum tahu kapan benih tersebut dibagikan kepada kami”*

- Hasil Analisis

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi suatu kebijakan. Hal ini sangat dibutuhkan karena akan berpengaruh terhadap hasil implementasi suatu kebijakan. Seperti pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sebenarnya transmisi, kejelasan, konsisten dan koordinasi telah terlaksana dengan baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagai pembuat kebijakan, Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 dan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala Bidang Pertanian, Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan, koordinator PPL dan petani penerima BLBU tersebut. Dari hasil informasi yang didapat menggambarkan bahwa informasi tentang Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sudah sangat jelas disampaikan dari pembuat kebijakan yang dalam hal ini Kementerian Pertanian kepada pelaksana kebijakan yang dalam hal ini salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka. Dari Dinas Pertanian dan Peternakan juga telah menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan implementasi BLBU ini ke pelaksana di lapangan yaitu PPL dan petani melalui melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan di kabupaten dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini seperti BKP yang merupakan induk organisasi dari PPL, yang kemudian diteruskan dengan melakukan rapat koordinasi antara koordinator PPL dengan PPL di tingkat BPP, sedangkan informasi ke petani, informasi tentang pelaksanaan program BLBU ini disampaikan oleh PPL yang bertugas pada masing-masing desa yang sebelumnya telah melakukan koordinasi di BPP masing-masing.

Jadi pada pelaksanaan Program BLBU ini, menurut peneliti faktor informasi dari segi kejelasannya sudah sangat jelas dari tingkat dinas sampai ke

petani penerima bantuan dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan tidak ada terjadi suatu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi yang baik.

Tabel 4.3. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi

No.	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	<b>Transmisi</b>	Sehubungan dengan adanya program Bantuan Langsung Benih Unggul ini, Pelaksana telah memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk dapat mensukseskan program tersebut	Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah telah diteruskan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 kepada personil yang tepat yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka .
2.	<b>Kejelasan</b>	Pelaksana telah mendapat kejelasan mengenai tujuan	Penjelasan melalui Peraturan Menteri

		dan sasaran program.	Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2 011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011
3.	<b>Konsistensi</b>	Semua pihak yang berkepentingan melaksanakan program ini sudah konsisten dengan perintah pelaksanaan baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima cukup jelas dan tidak bertentangan.
4.	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi yang telah dilakukan antar dinas/instansi/terkait cukup baik.	Dilakukan koordinasi formal (rakor, pertemuan, pemberian pedum, juknis) dan informal

**b. Sumber Daya (*Resources*)**

Komponen sumber daya ini meliputi sumber daya manusia (SDM) baik jumlah staf dan keahlian, informasi yang relevan, kewenangan dan fasilitas (sarana prasarana dan dana/finansial).

Kondisi sumber daya ini terkait dengan kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Sumber Daya manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam proses implementasi kebijakan merupakan peranan kunci. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola dan memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang lengkap tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak di dukung oleh SDM yang profesional. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan program BLBU di Kabupaten Bangka, menurut Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Bangka, bahwa secara kuantitas/jumlah dan kualitas belum mencukupi dan memadai. Staf yang ada masih terbatas jumlahnya sehingga mereka belum bisa fokus untuk menangani program BLBU karena masih ada tugas-tugas lain yang terdapat pada bidang Pertanian.

Jumlah SDM yang ada di Bidang Pertanian selaku pelaksana program BLBU ini sebanyak 9 orang. Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut: Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi 3 orang, Staf 5 orang. Sedangkan kategori SDM berdasarkan latar belakang pendidikan formal adalah Pasca Sarjana (S2) 1 orang, Sarjana (S1) 7 orang, dan D3 1 orang.

Tabel 4.4. Kualifikasi SDM di Bidang Pertanian Tahun 2011

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)
1.	Kepala Bidang	Sarjana (S2)	1
2.	Kepala Seksi	Sarjana (S1)	3
3.	Staff PNS	Sarjana (S1)	4
		D-3	1

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas memang belum optimal, hal ini jika dikaitkan dengan jumlah tugas atau kegiatan-kegiatan yang harus mereka selesaikan, baik tugas atau kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) merupakan salah satu Program yang bersumber dari APBN dan perlu penanganan yang serius sehingga hasil yang didapat harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Jadi pada pelaksanaan program ini, SDM yang harus benar-benar mengerti dan memahami target yang ingin dicapai dari Program tersebut ini yang ada selain program BLBU. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kabid Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kasi Bina Produksi dan Usaha Tani dan PPL yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Kepala bidang Pertanian mengatakan seperti berikut,

*“Memang dari segi kualitas maupun kuantitas, SDM yang ada di Bidang Pertanian untuk saat ini sangat minim sekali, sedangkan pekerjaan yang harus dilaksanakan bukan semata BLBU saja namun tugas-tugas lain juga harus kami lakukan, misalnya kegiatan-kegiatan baik rutin ataupun tugas lain yang menyangkut kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN, jadi SDM yang ada, tidak ada secara khusus yang menangani BLBU”.*

Masih menurut Kabid Pertanian,

*“karena masih adanya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh petugas-petugas yang ada, maka mereka cenderung tidak fokus dalam menangani dan memahami program BLBU ini”*

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa :

*“Dalam pelaksanaan Program BLBU ini, tidak ada seksi khusus, jadi semua petugas yang ada di bidang pertanian sama-sama turut serta dalam pelaksanaan program BLBU ini.”*

Lebih lanjut menurut Kasi Bina Produksi dan Usaha Tani mengatakan

Bahwa,

*“Kalau berbicara masalah SDM, memang SDM yang ada masih kurang dan perlu penambahan lagi, karena kami dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sementara SDM yang ada pada kami terbatas jumlahnya”.*

Sedangkan menurut PPL desa desa Berbura, mengatakan,

*“SDM petani yang ada belum optimal, terutama dalam hal cara budidaya padi, jadi perlu ditingkatkan lagi”*

Lebih lanjut PPL desa Pangkal Niur mengatakan,

*“kadang-kadang masih ada petani yang tidak hadir pada saat dilakukan pertemuan kelompok”*

Pernyataan PPL ini dikuatkan oleh pendapat pak Haji Muhasim, salah satu perwakilan (Ketua Kelompok Tani) dari Desa Pangkal Niur yang berhasil diwawancara, yang mengatakan bahwa,

*“Pada saat disuruh kumpul, kadang-kadang agik ade (ada) anggota kelompok yang dak (tidak) adir (hadir), mungkin ade (ada) gawi (pekerjaan) yang laen (lain)”*

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jumlah SDM yang ada dari segi kuantitas memang dapat dikatakan sangat minim sekali. Dari table yang telah disajikan di atas, jumlah SDM yang ada hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk kepala bidang dan kepala seksi, sedangkan pekerjaan yang harus mereka selesaikan selain pelaksanaan

program BLBU mereka juga harus menyelesaikan tugas-tugas lain di luar BLBU. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala bidang dan kepala seksi di atas yang mengatakan bahwa memang dari segi kuantitas jumlah yang ada masih kurang sedangkan pekerjaan yang bukan hanya BLBU saja tetapi masih ada kegiatan-kegiatan rutin lain baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pada pelaksanaan implementasi program BLBU yang mereka laksanakan tersebut, tidak melibatkan seksi lain yang ada pada bidang tersebut dan bidang lain di luar bidang pertanian, menurut peneliti kemungkinan hal ini dikarenakan dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas pada bidang tersebut atau seksi lain yang diluar seksi produksi dan bina usaha tani.

Dari uraian di atas berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disajikan, tidak ada pelatihan khusus bagi SDM pelaksana program BLBU ini, hal ini dapat diketahui dari pendapat yang telah disampaikan oleh Kepala bidang dan Kepala Seksi pada uraian di atas, jadi pada pelaksanaan program ini, pelaksana hanya berpedoman pada Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan arahan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi .

Pada pelaksanaan implementasi program ini juga tidak seksi khusus yang menangani BLBU tersebut hal ini dikarenakan jumlah SDM yang ada sangat minim sehingga pada pelaksana program ini belum bisa fokus untuk melaksanakan program ini. Belum bisa fokusnya SDM yang ada karena pekerjaan yang harus mereka kerjakan bukan saja pelaksanaan program BLBU saja namun masih banyak tugas-tugas

yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan tugas pokok pada bidang pertanian yang lebih penting untuk mereka selesaikan dan belum adanya seksi khusus yang menangani BLBU ini mengakibatkan mereka tidak bisa fokus untuk mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan program BLBU ini. Program BLBU ini merupakan salah satu dari kegiatan yang bersumber dari APBN, namun masih ada kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari APBD II Kabupaten Bangka. Tidak adanya seksi khusus ini, bukannya dinas tidak mau membentuknya, namun dari keterbatasan jumlah SDM yang ada sulit untuk dibentuk seksi khusus tersebut.

## 2. Informasi yang Relevan

Agar program BLBU ini dapat berjalan dengan baik, maka informasi tentang pelaksanaan program ini harus dapat disampaikan dengan baik. Informasi yang dibutuhkan disini adalah informasi bagaimana melaksanakan program tersebut agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dan tidak menyimpang dari yang diharapkan, serta informasi tentang ketaatan dari organisasi maupun individu terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan hasil pemantauan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa informasi tentang bagaimana pelaksanaan program ini telah disampaikan oleh tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Perementan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman

Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011. Jadi dengan adanya pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan tersebut, informasi tentang bagaimana pelaksanaan program BLBU ini dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pelaksana program juga sudah cukup jelas.

### 3. Wewenang

Pada pelaksanaan program ini, wewenang sudah diberikan secara penuh kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka melalui Kepala Bidang Pertanian. Pada pelaksanaan program ini, daerah-daerah yang mendapatkan bantuan hanya menerima barang berupa benih bukan berupa uang. Jadi Kepala Bidang Pertanian diberikan kewenangan untuk mengatur pendistribusian benih tersebut sehingga sampai ke petani yang sesuai dengan surat keputusan kepala dinas tentang petani penerima bantuan tersebut. Adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka tentang penetapan kelompok tani penerima bantuan, menunjukkan bahwa wewenang untuk melaksanakan program tersebut benar-benar telah diberikan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan khususnya Bidang Pertanian untuk dapat mensukseskan program tersebut.

#### 4. Fasilitas

Fasilitas yang ada perlu diperhatikan pada pelaksanaan suatu program. Fasilitas yang baik akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu program. Supaya program BLBU ini dapat berjalan dengan baik dan hasil yang dicapai bisa maksimal, maka beberapa macam fasilitas yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Benih

Fasilitas yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan program ini Fasilitas yang baik akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini. Pada pelaksanaan program ini, fasilitas yang diberikan ke petani berupa benih. Benih yang dibagikan ke petani tersebut merupakan benih unggul dengan varietasnya disesuaikan dengan agroklimat daerah setempat dan berdasarkan stok benih yang ada, misalnya varietas ciherang, situbagendit, ciliwung, IR-64, Tuwoti dan Infari II, lebih lengkapnya seperti yang tercantum dalam tabel 4.1 tentang realisasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/2086/Pernak/2011 tanggal 30 Juni 2011.

- Dana

Fasilitas dana yang disediakan dapat berupa insentif bagi petugas di lapangan dan dana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap

laporan kegiatan, dana yang diberikan berupa honorarium untuk pemandu lapang sebesar Rp. 200.000,- per orang per bulan yang dimulai dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dana tersebut disediakan untuk kegiatan pembinaan ke petani. Fasilitas dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBD II. Fasilitas dana tersebut hanya untuk honorarium, namun untuk dana perjalanan bagi pemandu lapang tidak dianggarkan karena pekerjaan tersebut sudah dianggap sebagai pekerjaan rutin pemandu lapang yang harus dilaksanakan secara rutin. Dana perjalanan ke lapangan hanya dianggarkan bagi operasional pelaksana di kabupaten (bidang pertanian). Dana tersebut merupakan dana pembinaan bagi kepala bidang pertanian ke lokasi-lokasi bantuan yang dilakukan secara berkala setiap bulan sekali. Pada pelaksanaan program ini, tidak ada tambahan dan untuk honorarium.

- Sarana irigasi.

Selain fasilitas dana dan benih, fasilitas lain yang sangat perlu diperhatikan adalah sarana irigasi yang baik dan optimal penggunaannya. Fasilitas irigasi yang baik, akan menjamin pemberian air pada tanaman akan baik pula. Fasilitas irigasi dimaksud disini meliputi saluran irigasi, bendungan dan bangunan pembagi air untuk masing-masing lahan. Pada pelaksanaan

budidaya pertanian terutama padi sawah Keberadaan air sangat mutlak dibutuhkan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang pertanian :

*“Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mendukung dengan adanya Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini Program ini sangat bagus dalam rangka peningkatan produksi beras, namun perlu dipersiapkan secara baik mengenai kemampuan SDM petugas, petani pelaksana dan juga penyediaan saprodi yang lengkap dengan didukung oleh sapras yang memadai. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani di Kabupaten Bangka yang sudah terbiasa menanam padi ladang dan padi sawah walaupun mereka sendiri belum begitu maksimal cara pengelolaannya seperti petani-petani yang ada di daerah Jawa dan mereka sangat menerima dengan adanya bantuan benih ini... ..eee karena untuk memenuhi kebutuhan benih yang unggul memang daerah Bangka maksudnya kabupaten Bangka masih sulit hingga saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya petani penangkar atau produsen yang handal yang bisa dijadikan sebagai pelaku yang bisa memproduksi benih dengan sendiri. Lain halnya dengan daerah-daerah yang sudah maju sektor perbenihannya, seperti di Jawa, mereka sebagai petani dengan mudah mendapatkan benih yang unggul, namun yang perlu menjadi perhatian kita disini adalah bukan hanya faktor benih saja yang diperhatikan, tapi faktor-faktor lain yang salah satunya sarana irigasi, karena sarana irigasi yang ada di daerah Bangka ini masih belum irigasi teknis, jadi kadang-kadang pada saat hujan deras, masih ada sawah-sawah petani tersebut tergenang atau banjir, karena bendungan yang belum maksimal disamping saluran irigasi yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya.”*

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Petugas Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) Desa Banyu Asin seperti berikut,

*“Namun yang perlu diperbaiki disini adalah masalah irigasinya, karena sarana irigasi disini belum baik atau maksimal, sebagai contohnya, masih sering banjir kalau hujan terlalu deras, sehingga sangat mengganggu, terutama pada saat panen hal ini*

*akan berpengaruh pada hasil panen. Kalau padinya terendam air, maka bisa merusak tanaman padi tersebut, maka dengan ini hasil yang didapat juga rendah.*

- **Kendaraan Operasional**

Kendaraan operasional khusus untuk pengawalan pelaksanaan program ini memang tidak ada. Namun untuk pengawalan pelaksanaan program ini, disediakan dana perjalanan untuk petugas yang berasal dari dinas kabupaten. Jadi dari uang perjalanan tersebut, dapat digunakan untuk rental kendaraan roda-4 yang digunakan sebagai kendaraan operasional ke lapangan. Hanya uang perjalanan yang disediakan tersebut sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan luas wilayah yang akan di pantau. Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari kepala bidang pertanian berikut :

*“Untuk kendaraan operasional roda-4 khusus untuk pengawalan program ini memang tidak ada, namun untuk pembinaan ke lapangan kadang-kadang kami bisa menggunakan kendaraan yang berasal dari kendaraan rental. Biaya rental tersebut kami ambil dari dana perjalanan yang ada, namun jumlahnya terbatas”.*

- **Hasil Analisis**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada belum bisa maksimal mendukung pelaksanaan program BLBU ini. Hal ini dilihat dari jumlah staf yang ada, baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang. Sedangkan kondisi fasilitas, informasi dan wewenang pada pelaksanaan program

ini cukup mendukung tapi belum maksimal sehingga perlu peningkatan lagi, seperti sarana irigasi yang perlu perbaikan dan dana yang tersedia hanya untuk honorarium pemandu lapang namun dan perjalanan untuk pemandu lapangan tidak dianggarkan.

Tabel. 4.5. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sumber Daya.

No.	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	<b>Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	Secara kualitas dan kuantitas, SDM yang ada masih perlu ditingkatkan lagi.	Pada pelaksanaan implementasi program ini jumlah SDM yang ada sangat minim sehingga pada pelaksana program ini belum bisa fokus untuk melaksanakan program ini. Belum bisa fokusnya SDM yang ada karena pekerjaan yang harus mereka kerjakan bukan saja pelaksanaan program BLBU saja namun masih banyak tugas-tugas yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan tugas pokok pada bidang pertanian yang lebih penting untuk mereka selesaikan dan hal ini pula menyebabkan mereka tidak bisa fokus untuk mempelajari lebih dalam tentang pelaksanaan program BLBU ini

2.	<b>Informasi</b>	Sudah cukup relevan, pelaksana mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang telah dibuat.	Pelaksana telah menerima Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011
3.	<b>Wewenang</b>	Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Bangka melalui kepala bidang pertanian.	Telah menerima pelimpahan wewenang dari tingkat pusat maupun provinsi untuk dapat melaksanakan program BLBU in.
4.	<b>Fasilitas</b>	Fasilitas berupa benih sudah cukup baik, namun fasilitas sarana irigasi dan dana yang ada perlu ditingkatkan lagi kualitasnya dan jumlahnya.	Benih yang didistribusikan ke petani sesuai dengan standar kualitas benih dan varietas benih juga adalah varietas unggul. Sedangkan fasilitas sarana irigasi belum bersifat teknis sehingga perlu perbaikan-perbaikan dan dana untuk perjalanan pemandu lapangan tidak dianggarkan dalam kegiatan ini.

c. **Sikap (*Dispositions/Attitude*)**

1. Sikap Implementator

Komitmen pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena apabila pelaksana kebijakan tidak sungguh-sungguh atau merasa bertolak belakang dengan pembuat kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), sebenarnya sangat baik bagi petani dalam rangka peningkatan produksi petani. Secara prinsip Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mendukung adanya implementasi program BLBU ini, namun dukungan pemerintah Kabupaten Bangka belum optimal dari segi penyediaan sarana irigasi yang dibutuhkan, dana pendamping dari sumber APBD II tidak tersedia dan sarana operasional untuk pengawasan ke lapangan juga tidak tersedia. Pada pelaksanaan program ini, sumber dana yang digunakan berasal dari APBN. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan bahwa pelaksanaan program BLBU di Kabupaten Bangka, mendapat tanggapan positif dari masyarakat penerima bantuan tersebut hal ini dapat dilihat dari jumlah luasan areal tanam yang diusulkan oleh petani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka. (maksudnya adalah bahwa lokasi-lokasi yang mendapat BLBU tersebut ditetapkan dengan Surat

Keputusan (SK) - kan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian,

*“Ya, saya sangat mendukung dan selalu berkomitmen untuk dapat mensukseskan program ini dengan cara membuat langkah-langkah perencanaan, pembinaan dan money yang baik dan terarah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diatur.”*

Lebih lanjut beliau mengatakan:

*“Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mendukung dengan adanya Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini Program ini sangat bagus dalam rangka peningkatan produksi beras, namun perlu dipersiapkan secara baik mengenai kemampuan SDM petugas, petani pelaksana dan juga penyediaan saprodi yang lengkap dengan didukung oleh saptas yang memadai. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani di Kabupaten Bangka yang sudah terbiasa menanam padi ladang dan padi sawah walaupun mereka sendiri belum begitu maksimal cara pengelolaannya seperti petani-petani yang ada di daerah Jawa dan mereka sangat menerima dengan adanya bantuan benih ini... ..eee karena untuk memenuhi kebutuhan benih yang unggul memang daerah Bangka maksudnya kabupaten Bangka masih sulit hingga saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya petani penangkar atau produsen yang handal yang bisa dijadikan sebagai pelaku yang bisa memproduksi benih dengan sendiri. Lain halnya dengan daerah-daerah yang sudah maju sektor perbenihannya, seperti di Jawa, mereka sebagai petani dengan mudah mendapatkan benih yang unggul, namun yang perlu menjadi perhatian kita disini adalah bukan hanya faktor benih saja yang diperhatikan, tapi faktor-faktor lain yang salah satunya sarana irigasi, karena sarana irigasi yang ada di daerah Bangka ini masih belum irigasi teknis, jadi kadang-kadang pada saat hujan deras, masih ada sawah-sawah petani tersebut tergenang atau banjir, karena bendungan yang belum maksimal disamping saluran irigasi yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya.”*

Hal sependapat dinyatakan oleh beberapa pendapat berikut ini :

seperti pendapat Kepala seksi Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani,

*“Kalau ditanya soal komitmen, tentu saya selaku kepala seksi sangat komit dan selalu mendukung dengan adanya program BLBU ini.*

*Apalagi program ini sangat baik untuk peningkatan produksi padi di kabupaten Bangka dan tentunya sangat membantu sekali bagi petani yang ada di Kabupaten Bangka. Selama ini kalau tidak ada bantuan seperti ini, benih yang mereka gunakan lebih banyak berasal dari benih-benih yang secara turun temurun itu-itu saja, tanpa ada proses perbanyak benih dan tidak bersertifikat.”*

Lebih lanjut seperti pendapat yang disampaikan oleh Petugas

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Berbura berikut,

*“Menanggapi persoalan tentang program pemerintah yaitu tentang Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut Kami selaku PPL sangat baik, jadi kami selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan, terus terang kami katakan bahwa kalau tidak ada program bantuan benih, sebageian besar petani kami ini selalu menggunakan benih yang tidak unggul dan tidak bersertifikat, misalnya saja untuk benih padi ladang atau padi ume untuk istilah kami di Bangka ini, kalau mereka tidak dapat bantuan benih, mereka menanam padi atau nugal istilah kami disini menggunakan benih padi lokal, seperti jenis atau varietas utan antu, mayang, raden, mukut dan lain-lain sehingga hasil padi yang mereka peroleh lebih rendah. Mungkin kami selaku PPL ini berharap kalau bisa benih yang salurkan kalau bisa sesuai dengan musim tanam, kalau bisa awal-awal musim tanam, kalau kita disini biasanya bulan-bulan Juli atau Agustus”.*

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Petugas Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) Desa Banyu Asin seperti berikut,

*“Adanya kegiatan ini maksudnya Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut saya secara pribadi maupun dinas dan selaku PPL menyambut dengan sangat baik program ini, mengapa saya katakan demikian karena kami selaku Penyuluh Pertanian Lapangan yang lebih banyak berhadapan dengan petani yang ada dilapangan ini merasa bagaimana ya, boleh dikatakan prihatin, karena kalau tidak ada bantuan benih dari pemerintah, benih yang mereka gunakan adalah benih yang mereka hasilkan dari panen yang ada kemudian mereka pilih yang bernas untuk dijadikan benih pada musim tanam berikutnya, jadi benih itu-itu saja yang mereka gunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang mereka peroleh, jadi saya katakan sekali lagi bahwa dengan adanya program ini saya selaku*

*PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kalau dikelola dengan baik dan intensif maka dengan benih yang unggul hasil yang didapat saat panen lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan benih lokal atau benih yang tidak bersertifikat sehingga saya merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan. Namun yang perlu diperbaiki disini adalah masalah irigasinya, karena sarana irigasi disini belum baik atau maksimal, sebagai contohnya, masih sering banjir kalau hujan terlalru deras, sehingga sangat mengganggu, terutama pada saat panen hal ini akan berpengaruh pada hasil panen. Kalau padinya terendam air, maka bisa merusak tanaman padi tersebut, maka dengan ini hasil yang didapat juga rendah.*

*Jadi Kalau ditanya masalah komitmen, ya pasti adalah. Kami sebagai PPL ini kan harus selalu mendukung setiap ada program pemerintah, bukan hanya program BLBU ini saja, mungkin program-program yang lain juga harus kami dukung”*

Ditambahkan lagi oleh pendapat yang disampaikan oleh Petugas

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pugul berikut,

*“Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut Kami selaku PPL sangat baik, jadi kami selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan.*

*Komitmen saya selaku PPL pasti ada untuk mensukseskan program ini, namun yang menjadi kendala kami adalah benih datang terlambat dan tidak sesuai dengan musim tanam. Akibatnya hasil yang diperoleh tidak maksimal dan boleh dikatakan gagal. Selain itu juga ada serangan penyakit blast.”*

Sedangkan menurut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa

Pangkal Niur mengatakan sebagai berikut,

*“Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut Kami selaku PPL sangat baik, jadi kami selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan”.*

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Mulyoto selaku Koordinator PPL Puding Besar mengatakan seperti berikut,

*“BLBU ini merupakan salah satu program Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan Peningkatan Produksi Benih Nasional (P2BN), jadi kami selaku PPL yang tugasnya lebih banyak berhadapan dengan petani, yaitu sebagai pembina petani di lapangan sangat mendukung sekali dengan adanya program ini dan kami wajib dapat mensukseskan program ini demi pemenuhan beras di Kabupaten Bangka. Namun dalam pelaksanaannya kami merasa ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti jaringan irigasi yang ada di wilayah kerja kami ini masih sifatnya semi teknis bukan teknis. Hal ini mengakibatkan proses pengairan di sawah tidak dapat berjalan atau terlaksana dengan maksimal, dan disamping itu juga, saluran irigasi yang ada juga ada sebageian yang rusak. Hal ini menjadikan air tidak bisa mauk ke lahan. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kalau bisa sarana irigasi ini diperhatikan dengan cermat, karena ini sangat penting demi membantu pelaksanaan program BLBU ini, apalagi program BLBU ini bukan hanya tahun 2011 ini saja, namun tahun-tahun berikutnya juga akan ada lagi program ini. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perhatian dari Balai proteksi dalam rangka mendukung penanggulangan serangan hama dan penyakit, sebab pada pelaksanaan BLBU kali ini, untuk lokasi binaan kami terkena serangan pada pangkal tangkai malai, sehinggann banyak padi yang hampa.”*

Sedangkan hasil pendapat ketua kelompok tani di desa Pangkal Niur yang dijadikan responden mengatakan seperti berikut,

*“Kami selaku petani sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami selama ini kalau tidak ada bantuan, benih yang kami pakai berasal benih yang ada sejak nek (nenek) akek (kakek) kami luk lah (dahulu) kalok (kalau) nek (mau) be ume (berladang dan besawah). Sedengken (sedangkan) kalau kamu mau beli dari luar Bangka ni, harge (harga) e mahal, jadi kalau ada program BLBU in kami merasa sangat besar artinya bagi kami sebagai petani ne (ini),... ..ape agik (apalagi) benih itu gratis, jadi kamai dak (tidak) perlu mengeluarkan biaya untuk beli (membeli) benih tersebut bila perlu tiap taon (setiap tahun) kami mau.”*

Sedangkan hasil pendapat ketua kelompok tani di desa Tanah Bawah yang dijadikan responden mengatakan seperti berikut,

*“Petani disini sangat mendukung program bantuan benih unggul ini. Bantuan benih ini sangat baik bagi kami petani, karena benih yang diberikan benih unggul sehingga kami mengharapkan dapat hasil panen yang lebih tinggi”*

Lebih lanjut pendapat ketua kelompok tani di Desa Labu yang dijadikan responden mengatakan seperti berikut,

*“Program pemerintah ini bagi kami petani sangat baik apalagi kami ini sangat membutuhkan sekali benih unggul ini. Benih ini diberikan pemerintah secara gratis dan Cuma-Cuma kepada kami, jadi kami sangat mendukung sekali program pemerintah ini Kami juga berharap pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan bagi kami petani.”*

Serta hasil pendapat ketua kelompok tani di Desa Nibung yang dijadikan responden mengatakan seperti berikut,

*“Program bantuan benih unggul ini sangat kami harapkan dan kami senang sekali dengan adanya bantuan benih unggul ini. Kalau tidak ada bantuan benih, kami menggunakan benih lokal jadi hasilnya belum tentu tinggi dan dengan menggunakan benih unggul ini kami mengharapkan dapat mendapatkan hasil yang tinggi”.*

## **2. Dukungan pimpinan**

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bangka sangat menerima dan mendukung adanya program BLBU ini, hal ini disebabkan karena selain belum adanya penangkar yang aktif dan handal dan kebutuhan akan benih unggul bermutu tersebut sangat dibutuhkan bagi petaninya walaupun bentuk dukungan tersebut belum maksimal seperti faktor sarana irigasi yang belum begitu baik kualitasnya. Namun untuk tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Bangka akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal sangat perlu diperhatikan karena sarana irigasi yang

ada juga sangat memegang peranan yang penting dalam usaha meningkatkan produksi padi. Dari pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bangka tersebut kondisi sarana irigasi di kabupaten Bangka kurang optimal dan belum dapat mendukung secara maksimal, menurut peneliti hal itu sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan selama peneliti berdinasi di Dinas Pertanian Provinsi. Memang sarana irigasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung secara umum belum ada yang irigasi teknis seperti sarana irigasi yang ada di daerah pulau Jawa dan Sumatera yang irigasinya sudah dapat diatur sesuai dengan keinginan petani pengguna air dan sarananya sudah teratur dengan baik, namun di Kepulauan Bangka Belitung secara umum dan Kabupaten Bangka Secara khusus masih ada lahan sawah yang belum bisa diari air yang dikarenakan salurannya rusak dengan demikian saluran tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal, seperti apa yang telah disampaikan oleh Koordinator PPL kecamatan Puding Besar, yang mengatakan bahwa proses pengairan di sawah tidak dapat berjalan atau terlaksana dengan baik dan maksimal disebabkan karena saluran irigasi yang ada sebagian yang rusak yang berakibat air tidak bisa masuk ke lahan.

### **3. Insentif bagi pelaksana**

Pada pelaksanaan suatu program, insentif sangat dibutuhkan agar pelaksana program akan lebih semangat dalam mensukseskan program tersebut. Pada pelaksanaan program BLBU ini, insentif tersebut

disediakan untuk pemandu lapang dengan cara di SK-kan melalui SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/7525/Pernak/2011 tentang Penunjukan Pemandu Lapang Tahun Anggaran 2011. Dana tersebut bersumber dari APBD II Kabupaten Bangka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian yang menyatakan Bahwa :

*” Insentif untuk Pemandu Lapang diberikan untuk masing-masing pemandu sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan dan itu telah di nyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/7525/Pernak/2011 tentang Penunjukan Pemandu Lapang Tahun Anggaran 2011, namun hanya untuk honorarium, sedangkan uang perjalanan tidak ada, hal ini karena ptugas yang dijadikan sebagai pemandu lapang tersebut adalah PPL yang bertugas di wilayah setempat. Jadi dianggap sudah sebagai pekerjaan rutin PPL tersebut”*

#### **4. Transparansi**

Selain bentuk dukungan pemerintah, dan insentif, sikap/disposisi, pada pelaksanaan program ini juga harus ada transparansi dari pelaksana kebijakan program BLBU ini. Transparansi ini benar-benar diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program BLBU ini sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Sikap transparansi ditunjukkan salah satunya dengan membuat laporan-laporan tertulis tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta berapa besar dana yang telah digunakan.

Secara umum para pelaksana telah melaksanakan dengan cukup transparan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang

Pertanian yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini sangat transparan, keseluruhan kegiatan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan perkembangan pelaksanaan program di lapangan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian berikut ini

*“Menegenai perkembangan kemajuan dan transparansi pelaksanaan program BLBU ini, kami selalui membuat lapaoran perkembangannya, yaitu meliputi laporan fisik kegiatan di lapangan dan berapa keuangan yang telah dicairkan atau yang telah direalisasikan semuanya kami buat laporannya tiap bulan. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi dan pada akhir kegiatan juga kami telah membuat laporan tentang pelaksanaan program”*

- Hasil Analisis

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaksana kebijakan baik di dinas maupun di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat menerima program BLBU tersebut dengan demikian dari aspek sikap/disposisi, dukungan pimpinan, insentif, dan transparansi, secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pendapat yang disampaikan oleh masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya program BLBU yang telah digulirkan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pertanian yang mengatakan bahwa sangat menerima adanya program ini dikarenakan mereka belum punya penangkar yang handal yang dapat menghasilkan benih sendiri. Pendapat yang disampaikan oleh kepala bidang pertanian tersebut menurut peneliti sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Bangka Belitung secara umum, bukan hanya di Kabupaten Bangka saja, memang secara

keseluruhan kebutuhan benih untuk Kepulauan Bangka Belitung didatangkan dari pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, Sumatera Selatan dan harganya juga sangat tinggi jika benih tersebut diproduksi sendiri oleh penangkar yang ada di Bangka Belitung. Selain belum adanya penangkar yang aktif dan handal, memang faktor sarana irigasi juga memegang peranan yang penting dalam usaha meningkatkan produksi padi. Dari pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Bangka tersebut kondisi sarana irigasi di kabupaten Bangka kurang optimal dan belum dapat mendukung secara maksimal, menurut peneliti hal itu sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan selama peneliti berdinas di Dinas Pertanian Provinsi. Memang sarana irigasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung secara umum belum ada yang irigasi teknis seperti sarana irigasi yang ada di daerah pulau Jawa dan Sumatera yang irigasinya sudah dapat diatur sesuai dengan keinginan petani pengguna air dan sarananya sudah teratur dengan baik, namun di Kepulauan Bangka Belitung secara umum dan Kabupaten Bangka Secara khusus masih ada lahan sawah yang belum bisa diiri air yang dikarenakan salurannya rusak dengan demikian saluran tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal, seperti apa yang telah disampaikan oleh Koordinator PPL kecamatan Puding Besar, yang mengatakan bahwa proses pengairan di sawah tidak dapat berjalan atau terlaksana dengan baik dan maksimal disebabkan karena saluran irigasi yang ada sebagian yang rusak yang berakibat air tidak bisa masuk ke lahan. Dari pendapat yang disampaikan diatas, menyatakan bahwa tidak ada pendapat yang menyatakan menolak dengan keberadaan program BLBU yang telah dibuat oleh pemerintah

untuk meningkatkan produksi padi tersebut dan mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat mensukseskan program BLBU ini, namun masih adanya keterbatasan sarana irigasi dan jadwal pendistribusian benih yang kurang serempak dengan musim tanam petani, hal ini sangat berpengaruh terhadap produksi padi yang dihasilkan.

Jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan tadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komitmen untuk mensukseskan program BLBU ini sangat besar dari masing-masing pihak karena mereka menganggap bahwa program ini sangat baik untuk mereka dalam rangka meningkatkan produksi padi di Kabupaten Bangka, namun karena keterbatasan sarana seperti irigasi dan jadwal pendistribusian benih yang tidak sesuai dengan jadwal tanam maka hasil yang diperoleh tidak bisa maksimal untuk itu disarankan agar perlu perbaikan dan peningkatan lagi terhadap sarana irigasi yang ada di Kabupaten Bangka agar lebih baik dan diharapkan juga agar pendistribusian benih dapat terencana dengan baik sesuai dengan jadwal tanam yaitu sekitar bulan juli sampai dengan September.

Tabel 4.6. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sikap/Disposisi

No.	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	<b>Sikap implementor terhadap kebijakan</b>	Pelaksana mendukung kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan.

2.	<b>Dukungan pimpinan</b>	Pemerintah Kabupaten Bangka mendukung adanya program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Benih unggul bermutu sangat dibutuhkan petani di Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas tanaman padi, karena untuk menghasilkan benih sendiri yang dilakukan oleh petani untuk sekarang belum bisa.
3.	<b>Insentif bagi pelaksana</b>	Insentif untuk pelaksana dianggarkan sebagai honorarium pemandu lapang. Dana tersebut bersumber dari APBD II Kabupaten Bangka .	Karena adanya SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Nomor : 188.46/7525/Pernak/2011 tentang Penunjukan Pemandu Lapang Tahun Anggaran 2011. Pada Sk tersebut dicantumlakn besarnya honorarium bagi pemandu lapang sebesar Rp.200.000,- per bulan, terhitung bulan September sampai dengan bulan Desember.
4.	<b>Transparansi</b>	Kegiatan dilaksanakan secara transparan, dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kegiatan	Karena dipertanggungjawabkan secara tertulis. Laporan yang disampaikan dalam bentuk realisasi fisik dan keuangan.

#### d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pada implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi, karena dalam struktur birokrasi menggambarkan bagaimana kaitannya antara satu bagian

dengan bagian yang lain dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi.

Sebaiknya Salah satu aspek–aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP). Dengan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Edwards III (1980) mengatakan bahwa, ada 2 karakteristik utama dari birokrasi, yang salah satunya adalah prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

#### 1. Standar Operating Procedures (SOP)

Dalam pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011, unit organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini Bidang Pertanian belum mempunyai SOP. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pertanian berikut,

*“Kami akui bahwa dalam hal pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui*

*Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten ini memang SOPnya belum ada.”*

## 2. Fragmentasi

Menurut Kepala Bidang Pertanian mengatakan bahwa :

*“tanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan program Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten ini berada di unit organisasi Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dan tidak adanya seksi atau bagian yang khusus menangani pelaksanaan program ini, pelaksanaannya melekat di tugas pokok dan fungsi bidang Pertanian. Sebaiknya ada seksi khusus yang menangani kegiatan ini jadi dapat lebih fokus pelaksanaan program ini, namun keterbatasan SDM yang ada pada bidang kami jadi kegiatan ini tergabung dalam tugas kami sehari-hari dan dalam pelaksanaan program ini juga kami menadapat bantuan dari PPL di lapangan yang kedudukannya di bawah Badan Ketahanan Pangan”.*

- Hasil Analisis

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari struktur organisasi dalam kondisi yang kurang mendukung, karena SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak ada bagian atau seksi yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Bening Unggul (BLBU) ini. Hal ini membuat tidak adanya aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari para pelaksana. Tanggung jawab hanya terletak pada Kepala Bidang Pertanian dan eselon IV beserta staf yang ada di bidang tersebut. Dengan adanya pembebanan tanggung jawab hanaya pada Kepala Bidang saja, hal ini akan mengakibatkan proses pelaksanaan implementasi program BLBU ini tidak dapat berjalan dengan

optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kefokusannya dari kabid tersebut untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dilapangan.

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan BLBU ini, pelaksana kebijakan hanya bergantung pada Pedoman umum dan Petunjuk Teknis yang ada, sehingga apa yang harus mereka kerjakan hanya mengikuti Pedoman umum dan Petunjuk Teknis yang ada, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan hanya dibebankan pada Bidang pertanian melalui seksi Bina Produksi dan Usahatani, sedangkan seksi yang dimaksud disamping harus melaksanakan implementasi BLBU mereka juga diharuskan mengerjakan pekerjaan rutin dan kegiatan lain yang bersumber dari APBD dan APBN yang ada.

Selain tidak ada SOP, seksi khusus yang menangani pelaksanaan BLBU ini tidak terbentuk, hal ini jika dikaitkan dengan jumlah SDM yang ada, mereka menganggap bahwa dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas kegiatan yang lain seandainya SDM yang ada hanya mengurus BLBU saja. Selain itu juga bahwa pelaksanaan program BLBU ini sudah dianggap sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan secara bersama dan merupakan kegiatan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bidang Pertanian melalui Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani. Jadi dengan demikian tanpa ada seksi khusus yang menangani BLBU ini, program BLBU ini dapat mereka laksanakan.

Pada pelaksanaan BLBU ini, Dinas Pertanian dan Peternakan menjalin koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Hal ini penting untuk dilakukan karena petugas yang lebih banyak berhubungan dengan petani adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan secara garis komando, PPL berada di

bawah Badan Ketahanan Pangan (BKP). Kalau ditinjau dari segi efektifitas mungkin hal ini kurang maksimal karena PPL dilapangan selain harus menjalankan program BLBU, mereka juga dituntut untuk dapat mensukseskan program-program yang ada di BKP, sehingga PPL sangat berat tugasnya dilapangan. Sebaiknya PPL secara birokrasi berada di bawah Dinas Pertanian agar komando yang diberikan oleh kepala dinas atau kepala bidang dalam rangka pelaksanaan program ini lebih maksimal dan lebih lancar serta PPL lebih fokus dalam mengawasi pelaksanaan program BLBU yang ada di lokasi masing-masing.

Jadi dari beberapa pendapat dan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari unsur struktur organisasi menunjukkan dalam kondisi yang kurang mendukung, karena SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak ada bagian atau seksi yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan program implementasi Bantuan Langsung Benih Unggul tersebut.

Tabel 4.7. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi.

No.	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	<b>Ketersediaan SOP</b>	Standar Operasional Prosedur bagi pelaksana kebijakan tidak dibuat.	SOP belum dibuat, karena dianggap sudah ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun anggaran 2011 dan

			Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011
2.	<b>Fragmentasi</b>	Pola hubungan kerja cukup baik, namun tidak ada bagian atau seksi khusus yang menangani pelaksanaan program BLBU serta tidak ada pembagian tugas dan wewenang, semua di bawah tanggung jawab Kepala Bidang Pertanian melalui seksi Bina Produksi dan Usaha Tani	Karena sudah dianggap sebagai tugas rutin dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bidang Pertanian

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB. V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pada penelitian ini mempunyai maksud ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Bangka. Sehubungan dengan itu, maka dengan ini dapat diambil beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan, seperti sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan Program BLBU ini, aspek komunikasi yang terdiri : transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi sangat mendukung, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh masing-masing informan tidak ada pendapat yang saling bertentangan dengan kebijakan BLBU ini. Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang Pedoman Umum BLBU dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 23/HK.310/C/4/2011 tentang Petunjuk Teknis BLBU menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini sudah sangat membantu dalam pelaksanaan program BLBU ini dan informasi yang disampaikan ke masing-masing pelaksana sudah sangat jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi menurut teori Edwards sudah sangat baik dalam rangka mensukseskan program BLBU ini.

2. Pada pelaksanaan Program BLBU ini, aspek sumber daya yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia dan fasilitas sarana irigasi dan dana.
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada bidang Pertanian berjumlah 9 (sembilan) orang, sudah termasuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi, hal ini memang bisa menjadi suatu kelemahan bagi bidang tersebut. Seharusnya ada penambahan lagi staf pada bidang ini, terutama staf bagian lapangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). PPL yang ada sekarang berada di dalam Organisasi Badan Ketahanan Pangan (BKP), kalau PPL tersebut masuk ke dalam Organisasi Dinas Pertanian akan lebih menambah lagi kekuatan personil bidang pertanian di tingkat lapangan. Suatu program kalau tidak diimbangi dengan personil yang memadai, bisa berjalan namun hasil yang dicapai tidak akan sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan pertanian itu lebih banyak aplikasi di lapangan dan perlu pendampingan staf atau petugas dilapangan yang handal.
  - b. Fasilitas sarana irigasi yang ada memang harus menjadi pokok perhatian karena di dalam sistem budidaya apapun air sangat menjadi kebutuhan pokok yang harus menjadi perhatian, seperti irigasi untuk budidaya padi sawah pada pelaksanaan program BLBU yang ada tersebut. Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti kelapangan menunjukkan bahwa sarana irigasi yang di kabupaten Bangka memang perlu dilakukan peningkatan lagi kualitasnya sehingga dapat lebih mendukung peningkatan produksi padi pada areal tersebut.

- c. Dana operasional dalam menunjang pelaksanaan program ini perlu ditingkatkan lagi terutama tenaga dilapangan. Pada kegiatan ini dana yang tersedia bagi pemandu di lapangan hanya berupa honor saja namun biaya untuk perjalanan pembinaan tidak dianggarkan. Sebenarnya dan untuk perjalanan dalam pembinaan bagi tenaga lapangan tersebut angat membantu bagi petugas dilapangan, apalagi kala petugas tersebut masih berstatus honorer atau tenaga kontrak.
  - d. fasilitas berupa benih yang didistribusikan, wewenang , dan informasi sudah cukup baik dan mendukung. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah pendistribusian benih dan tingkat adaptasi varietas benih padi yang disampaikan ke petani, kalau tidak sesuai dengan agroklimat dana musim tanam pada daerah tersebut, maka akan mempengaruhi jumlah hasil yang didapat pada areal tersebut (produksi), misalnya untuk padi ladang.
3. Pada pelaksanaan Program BLBU ini, sikap/disposisi pelaksana, dukungan pimpinan, insentif petugas dan transparansi sudah baik dan sangat mendukung dalam mensukseskan program BLBU ini.
  4. Aspek struktur birokrasi yang ada belum mendukung dalam pelaksanaan program BLBU ini, hal ini dapat dilihat dari SOP dan fragmentasi yang termasuk ke dalam aspek tersebut. Pada kegiatan, SOP dan seksi yang khusus menangani program ini tidak ada, sehingga tugas dan wewenang masing-masing bagian tidak jelas dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal. Pada pelaksanaan program ini yang lebih besar beban kerjanya adalah kepala Bidang Pertanian.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam proses implementasi program BLBU selanjutnya sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan program BLBU berikutnya dapat lebih baik lagi hasilnya. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan singkat kepada personil yang ada agar lebih memahami tentang tujuan dan sasaran diadakannya program BLBU tersebut dan staf yang ada dapat lebih memperhatikan pelaksanaan program BLBU tersebut. Sedangkan penambahan personil perlu dilakukan lagi, karena program-program di bidang pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan ini cukup banyak, sehingga dengan jumlah staf yang ada kemungkinan akan sulit menacapai hasil yang maksimal. Sebenarnya personil yang ada cukup baik sebelum adanya pemekaran kabupaten dan pemekaran dinas.
2. Fasilitas sarana irigasi yang ada perlu diperbaiki lagi kondisi fisiknya agar fungsinya sebagai sarana pengairan dapat lebih baik dan optimal. Perbaikan tersebut dapat dilakukan pada bangunan bendungan yang bocor, tanggul-tanggul yang rusak dan saluran pembuangan (Drainase) yang kurang berfungsi, sehingga pada saat curah hujan tinggi sawah tidak mengalami banjir. Kondisi banjir ini akan lebih parah apabila pada saat padi telah memasuki fase pengisian malai karena pada saat kondisi banjir kadang-kadang penyakit akan mudah menyerang tanaman, hal ini akan membuat kondisi pertanaman rusak dan mengakibatkan bisa gagal panen.

3. Pada pelaksanaan program BLBU yang berikutnya, sebaiknya dianggarkan juga dana perjalanan bagi pemandu lapang melalui dana pendampingan kegiatan dari APBD II sehingga pembinaan yang dilakukan dapat lebih intensif lagi dan dengan adanya dana tambahan untuk perjalanan tersebut diharapkan petugas dilapangan akan lebih termotivasi lagi dalam melakukan pembinaan ke lapangan.
4. Perlunya dibuat SOP dan dibentuk seksi khusus yang menangani pelaksanaan program BLBU ini, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, hasil yang dicapai juga lebih baik. Dengan adanya pembentukan seksi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih khusus kepada pelaksanaan program BLBU tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Sembiring, Harianto, Hermanto Siregar dan Bungaran Saragih (2010), "Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani : Kinerja dan Perspektif ke Depan." (Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8 nomor 4, Desember 2010 : 339 – 361). Dalam website [http://www./download/journal/files/brapub/Nazwar%20\\_03\\_.pdf](http://www./download/journal/files/brapub/Nazwar%20_03_.pdf) diakses tanggal 8 oktober 2012.
- Burhan Bungin, (2001). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2011). *Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul (Padi, Jagung dan Kedelai) Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010). *Laporan Tahunan Kegiatan Balai Benih Pertanian Tugas Perbantuan (TP) Pangan*. Pangkalpinang: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010). *Laporan Kegiatan Program Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun 2010*. Pangkalpinang: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010).
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010). *Statistik Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 2010*. Pangkalpinang: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010). *Laporan Tahunan Kegiatan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bangka Belitung Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011*. Pangkalpinang: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (2010). *Laporan Kegiatan Perbanyak Benih Padi Sumber dana APBN (Tugas Perbantuan) Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010*. Pangkalpinang: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dinas Pertanian dan Peternakan. (2012). *Laporan Kegiatan Pelaksanaan BLBU Tahun 2011*. Sungailiat : Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dewi, Effendi dan Trully Gultom, (2010). Pengaruh Tingkat Penerapan Panca, Usaha Tani Luas Areal Tanam dan Jenis Varietas Benih Padi terhadap Produksi dan Pendapatan Anggota Kelompok Tani di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.” Dalam website [http://www./download/journal/files/brapub/Nazwar%20\\_03\\_.pdf](http://www./download/journal/files/brapub/Nazwar%20_03_.pdf) diakses tanggal 10 Oktober 2012.
- Kismartini, dkk. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Muhajir, (1995). *Teori Administrasi*, Program Study Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana Untag, Surabaya
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. CV Alfabeta, Bandung
- Supadmi. (2009). Implementasi Program Three in One (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan) Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi RI Kasus Balai Latihan Kerja Industri Semarang. *Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Kebijakan Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, CAPS. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, edisi revisi, CAPS. Yogyakarta.

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENINGKATAN PENGGUNAAN BENIH BERMUTU  
VARIETAS UNGGUL MELALUI PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN  
BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011

Nama Mahasiswa : APRIOLOGRA

No Mahasiswa : 016758936

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : 1 (Kepala Bidang Pertanian)

1. Apakah Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Pemerintah Pusat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum mengenai apa-apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika sudah, bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut?
3. Apakah Saudara pernah menerima petunjuk pelaksanaan atau pedoman teknis mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Bagaimana kejelasannya?

4. Selain Dinas Pertanian dan Peternakan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam kegiatan BLBU ini? Kalau ada, tolong jelaskan dinas/instansi/lembaga lain apa saja?
5. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
6. Apakah ada pertemuan antara instansi/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kalau iya, apakah dilakukan secara rutin?
7. Apakah dari segi kuantitas, SDM pelaksana dari kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencukupi?
8. Apakah SDM pelaksana kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kelemahannya.
9. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program bantuan langsung benih unggul ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya.
10. Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul yang menjadi tugas anda untuk mengimplementasikannya. Jika belum paham, hal-hal apa saja yang belum anda pahami.

11. Menurut anda apakah program bantuan langsung benih unggul ini baik untuk diimplementasikan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
12. Bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap program bantuan langsung benih unggul?
13. Apakah anda mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul ?
14. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.
15. Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul ini? Apakah ada laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ya, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
16. Apakah ada seksi atau bagian yang mengurus kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Apakah ada struktur organisasinya?  
Jika ada bagaimana strukturnya ?
17. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaan sudah sesuai aturan yang ada.
18. Apakah tugas dalam melaksanakan kebijakan Program Bantuan Langsung Benih Unggul sudah diatur dalam Peraturan /Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas?

19. Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul diterima dimasyarakat ?  
Jika belum mengapa ? Jika sudah bagaimana perkembangannya ?
20. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
21. Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul akan diteruskan ? Jika tidak mengapa ?
22. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program ini sudah cukup dan memadai?
23. Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul sudah disosialisasikan ke petani penerima, jelaskan?

UNIVERSITAS TERBUKA

### Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN BENIH BERMUTU VARIETAS UNGGUL MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011

Nama Mahasiswa : APRIOLOGRA

No Mahasiswa : 016758936

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : II (Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani )

1. Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?
2. Apakah Saudara pernah menerima petunjuk pelaksanaan atau pedoman teknis mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Bagaimana kejelasannya?
3. Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?
4. Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kalau ada, dalam bentuk apa, apakah secara formal dan informal dirasakan cukup memadai?
5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program ini sudah cukup dan memadai?

6. Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?
7. Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.
8. Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
9. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan ? Jelaskan..
10. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

UNIVERSITAS TERBUKA

### Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENINGKATAN PENGGUNAAN BENIH BERMUTU  
VARIETAS UNGGUL MELALUI PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN  
BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011

Nama Mahasiswa : APRIOLOGRA

No Mahasiswa : 016758936

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : III (Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/Penyuluh  
Pertanian Lapangan (PPL))

1. Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?
3. Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?
4. Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.
5. Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

6. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan ?
7. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

UNIVERSITAS TERBUKA

### Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN BENIH BERMUTU VARIETAS UNGGUL MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2011

Nama Mahasiswa : APRIOLOGRA

No Mahasiswa : 016758936

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : IV (Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih)

1. Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya ?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?
3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?
4. Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?
5. Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?
6. Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ? Kalau tidak, mengapa ?

## Lampiran 2. Sampel Transkrip Hasil wawancara

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : 1 (Kepala Bidang Pertanian)

**Tempat** : Sungailiat, Tanggal 14 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.	Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan program BLBU ini melalui pemberian 15/Permentan/SR.120/3/2011 tentang pedoman umum dalam pelaksanaan program BLBU ini yang mencakup tujuan, sasaran, Spesifikasi Teknis, Lokasi dan kriteria penerima, penyaluran benih, monev dan laporan kegiatan BLBU) disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan dan diberikan juga pedoman teknis pelaksanaan kegiatan program BLBU”.
2	Apakah Pemerintah Pusat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum mengenai apa-apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika sudah, bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut?	Sudah, Pemerintah Pusat telah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum dan saya rasa cukup jelas dengan adanya pedoman tersebut. Di dalam pedoman umum sudah memberikan pedoman tentang BLBU, yang meliputi tujuan, sasaran, spesifikasi teknis, lokasi dan kriteria penerima, penyaluran benih.
3	Apakah Saudara pernah menerima petunjuk pelaksanaan atau pedoman teknis mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Bagaimana	Pedoman teknis sudah pernah saya terima. Dimana dalam pedoman teknis tersebut memberikan pedoman tentang teknis pelaksanaan kegiatan BLBU.

No	Pertanyaan	Jawaban
	kejelasannya?	
4.	Selain Dinas Pertanian dan Peternakan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam kegiatan BLBU ini? Kalau ada, tolong jelaskan dinas/instansi/lembaga lain apa saja?	Selain Dinas pertanian, dinas yang berhubungan dengan kegiatan ini adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP), karena untuk petugas yang ada dilapangan dan lebih banyak berhubungan dengan petani adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sedangkan PPL berada di bawah komando Kepala Badan Ketahanan Pangan.
5.	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?	koordinasi antar instansi terkait sudah cukup baik dan saling mendukung untuk pelaksanaan program BLBU ini di Kabupaten Bangka misalnya BKP, secara formal dilakukan pertemuan dengan instansi terkait yang dilaksanakan secara rutin baik di provinsi maupun di kabupaten.
6.	Apakah ada pertemuan antara instansi/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kalau iya, apakah dilakukan secara rutin?	Pertemuan antar instansi terkait dalam mendukung program ini secara rutin dilakukan. Pertemuan dilakukan secara rutin tiga kali dalam satu periode pelaksanaan BLBU, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi .
7.	Apakah dari segi kualitas dan kuantitas, SDM pelaksana dari kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencukupi?	Memang dari segi kualitas maupun kuantitas, SDM yang ada di Bidang Pertanian untuk saat ini sangat minim sekali, sedangkan pekerjaan yang harus dilaksanakan bukan semata BLBU saja namun tugas-tugas lain juga harus kami lakukan, misalnya kegiatan-kegiatan baik rutin ataupun tugas lain yang menyangkut kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN, jadi SDM yang ada, tidak ada secara khusus yang menangani BLBU karena masih adanya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh petugas-

No	Pertanyaan	Jawaban
		petugas yang ada, maka mereka cenderung tidak fokus dalam menangani dan memahami program BLBU ini
8.	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program bantuan langsung benih unggul ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya.	Saya selaku Kepala Bidang Pertanian sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Terus terang saya katakan bahwa petani kami yang di Kabupaten Bangka ini sangat terbantu sekali dengan adanya program ini terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu yang tentunya bersertifikat. Memang kami akui bahwa di daerah kami belum ada petani penangkar yang bisa secara sendirinya memproduksi benih unggul yang bersertifikat. Jadi selama ini petani kami masih mengharapkan bantuan seperti ini. Selain program BLBU yang bersifat nasional ini, kami juga menganggarkan bantuan benih ini dari APBD Tingkat II dengan maksud agar produksi bisa meningkat dan petani kami merasa terbantu.
9.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul yang menjadi tugas anda untuk mengimplementasikannya. Jika belum paham, hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Secara umum cukup memahami tentang kebijakan program ini, mungkin dari pedoman umum yang ada dapat diketahui apa yang telah menjadi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program ini. Mudah-mudahan dalam terlaksana dengan baik sesuai dengan pedum yang ada.
10.	Bagaimana dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap program bantuan langsung benih unggul?	Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mendukung dengan adanya Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini Program ini sangat bagus dalam rangka peningkatan produksi beras, namun perlu dipersiapkan secara baik mengenai kemampuan SDM petugas, petani pelaksana dan juga penyediaan saprodi yang lengkap dengan didukung oleh saporas yang memadai. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani di Kabupaten Bangka yang sudah terbiasa menanam padi

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>ladang dan padi sawah walapun mereka sendiri belum begitu maksimal cara pengelolaannya seperti petani-petani yang ada di daerah jawa dan mereka sangat menerima dengan adanya bantuan benih ini.....eee karena untuk memenuhi kebutuhan benih yang unggul memang daerah Bangka maksudnya kabupaten Bangka masih sulit hingga saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya petani penangkar atau produsen yang handal yang bisa dijadikan sebagai pelaku yang bisa memproduksi benih dengan sendiri. Lain halnya dengan daerah-daerah yang sudah maju sektor perbenihannya, seperti di jawa, mereka sebagai petani dengan mudah mendapatkan benih yang unggul, namun yang perlu menjadi perhatian kita disini adalah bukan hanya faktor benih saja yang diperhatikan, tapi faktor-faktor lain yang salah satunya sarana irigasi, karena sarana irigasi yang ada di daerah Bangka ini masih belum irigasi teknis, jadi kadang-kadang pada saat hujan deras, masih ada sawah-sawah petani tersebut tergenang atau banjir, karena bendungan yang belum maksimal disamping saluran irigasi yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya.</p>
11.	<p>Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan program ini memiliki SOP yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan program sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada?</p>	<p>Kami akui bahwa dalam hal pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten ini memang SOPnya belum ada.</p> <p>tanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan program Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu Varietas Unggul melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten ini berada di unit organisasi Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka dan tidak adanya seksi atau bagian yang khusus menangani pelaksanaan program ini, pelaksanaannya melekat di tugas pokok dan fungsi bidang Pertanian. Sebaiknya ada seksi khusus yang menangani kegiatan ini jadi dapat lebih fokus pelaksanaan program ini, namun keterbatasan SDM yang ada pada bidang kami jadi kegiatan ini tergabung dalam tugas kami sehari-hari dan dalam pelaksanaan program ini</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		juga kami menadapat bantuan dari PPL di lapangan yang kedudukannya di bawah Badan Ketahan Pangan.
12.	Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.	Ya, saya sangat mendukung dan selalu berkomitmen untuk dapat mensukseskan program ini dengan cara membuat langkah-langkah perencanaan, pembinaan dan monev yang baik dan terarah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diatur.
13.	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung benih unggul ini? Apakah ada laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ya, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?	Ya. Laporan tetap dibuat mencakup laporan mengenai rencana dan realisasi bantuan benih, laporan awal, perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan BLBU.
14.	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Apakah ada struktur organisasinya? Jika ada bagaimana strukturnya ?	Seksi khusus yang menangani program ini belum ada karena keterbatasan SDM yang ada pada bidang kami,. Jadi program ini diurus oleh seksi Bina Produksi dan Usaha Tani.
15.	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaan sudah sesuai aturan yang ada.	Aturan tersebut sudah ada, namun dalam pelaksanaanya belum optimal.
16.	Apakah tugas dalam melaksanakan kebijakan Program Bantuan Langsung	SK Kepala Dinas tentang pelaksanaan program ini sudah dibuat.

No	Pertanyaan	Jawaban
	Benih Unggul sudah diatur dalam Peraturan /Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas?	
17.	Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul diterima dimasyarakat ? Jika belum mengapa ? Jika sudah bagaimana perkembangannya ?	Kebijakan program BLBU sudah sesuai, namun perlu persiapan SDM pendukungnya. Kalau petani sangat meneriman sekali dengan bantuan benih ini, karena mereka mendapatkannya secara gratis dan benih yang diberikan juga benih bermutu dan bersertifikat.
18.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Program Bantuan benih ini sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mereka sangat terbantu sekali dengan adanya program ini.
20.	Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul akan diteruskan ? Jika tidak mengapa ?	Kalau tujuannya untuk kesejahteraan petani, saya rasa sebaiknya diteruskan, karena program-program seperti ini sangat dibutuhkan petani.
21.	Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program ini sudah cukup dan memadai?	Sarana prasarana untuk menunjang program ini belum memadai, dan masih perlu penambahan dan ditingkatkan lagi, terutama sarana irigasi yang ada, masih perlu lagi peningkatan kualitasnya.
22.	Apakah kebijakan program bantuan langsung benih unggul sudah disosialisasikan ke petani penerima, jelaskan?	Program ini sudah disosialisasikan, yaitu melalui pertemuan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan pertemuan di kabupaten.
23.	Menurut anda apakah program bantuan langsung benih unggul ini baik untuk diimplementasikan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?	Baik, tapi perlu persiapan yang baik dan waktu, misalnya kalau bisa benih yang datang ke petani sesuai dengan jadwal musim tanam petani, jadi petani dan petugas yang ada dilapangan tidak bertanya-tanya kapan benih sampai ke lokasi.

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : (Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Bidang Pertanian)

**Tempat/Tanggal/Waktu** : Sungailiat, 19 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Ya, saya mengenal adanya program BLBU. Informasi tentang program ini saya dapatkan dari Dinas Pertanian provinsi melalui sosialisasi yang dilakukan sebelum program ini berjalan.
2.	Apakah Saudara pernah menerima petunjuk pelaksanaan atau pedoman teknis mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Bagaimana kejelasannya?	Saya pernah baca juklak dan pedoman teknis program ini, dan itu saya dapatkan melalui Kepala Bidang Pertanian kami sendiri, kebetulan program BLBU ini sesuai dengan Tupoksi Bidang Pertanian dan saya selaku Kepala seksi mengetahui itu. Tentang kejelasan program ini menurut saya cukup jelas mengenai tujuan dan sasaran dan apa yang ingin dicapai dari program BLBU ini.
3.	Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Kalau ditanya mengenai tujuan dan sasaran dari program ini, kalau yang saya baca dari pedoman kegiatan ini saya sudah tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, tapi kalau secara lengkap ada di pedoman pengelolaan program BLBU ini.
4.	Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kalau ada, dalam bentuk apa, apakah secara formal dan informal	Koordinasi tetap kami lakukan dengan instansi yang berkaitan dengan kegiatan ini, salah satunya adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP) kabupaten Bangka. Hal ini harus kami lakukan karena yang banyak berhubungan dengan petani di lapangan adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL) sedangkan PPL itu secara kedinasan berada di bawah BKP bukan dinas pertanian dan peternakan. Oleh karena itu koordinasi dengan BKP tetap kami lakukan, jangan sampai terjadi salah komunikasi

No	Pertanyaan	Jawaban
	dirasakan cukup memadai?	tentang pelaksanaan program ini.
5.	Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan program ini sudah cukup dan memadai?	Pada pelaksanaan program ini, yang banyak berkaitan dengan ini adalah sarana dan prasarana terutama irigasi. Kalau dilihat dari segi irigasi, irigasi yang ada di daerah kami memang belum sebaik yang ada di daerah Jawa. Jadi irigasi di kabupaten Bangka ini secara umum belum maksimal masih semi teknis, sehingga perlu peningkatan lagi kualitasnya.
6.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Kalau tanggapan instansi atau dinas pertanian dan peternakan dengan adanya program ini sangat baik dan menerima, hal ini dikarenakan sangat membantu petani dengan adanya program ini. Saya katakan baik karena Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini baik untuk dilaksanakan dalam rangka mengatasi kesulitan memperoleh benih unggul sesuai dengan kebutuhan petani dan wajib ikut serta mensukseskan Program BLBU sesuai dengan TUPOKSI Bina Produksi dan Usahatani.
7.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Secara umum saya telah memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari program ini, karena dari pedoman yang telah ada padi kami dapat menjadi acuan pelaksanaan program BLBU ini.
8.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kalau ditanya soal komitmen, tentu saya selaku kepala seksi sangat komit dan selalu mendukung dengan adanya program BLBU ini. Apalagi program ini sangat baik untuk peningkatan produksi padi di kabupaten Bangka dan tentunya sangat membantu sekali bagi petani yang ada di Kabupaten Bangka. Selama ini kalau tidak ada bantuan seperti ini, benih yang mereka gunakan lebih banyak berasal dari benih-benih yang secara turun temurun itu-itu saja, tanpa ada proses perbanyak benih dan tidak bersertifikat
9.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan ?	Menurut saya baik, program BLBU ini sangat baik untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu dengan harapan

No	Pertanyaan	Jawaban
	Jelaskan..	hasil panen atau produksi padi yang didapat akan meningkatkan jika dibandingkan dengan menggunakan benih yang tidak bersertifikat. Apalagi harga benih sekarang harganya mahal, karena harus didatangkan dari luar kabupaten Bangka, jadi perlu ongkos yang cukup lumayan.
10.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Menurut saya, kebijakan program BLBU yang ada sangat bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten Bangka, maksudnya disini adalah petani yang biasa menanam padi. Di kabupaten Bangka ini belum ada penangkar yang bisa melakukan perbanyakan benih secara sendiri, jadi harus membeli benih dari pulau jawa, seperti Jawa Barat dan harganya cukup tinggi. Jadi dengan adanya program ini, mereka merasa terbantu sekali dalam hal pemenuhan kebutuhan benih padi yang bermutu dan bersertifikat.
11.	Bagaimana dengan SDM pelaksana yang ada di Bidang Pertanian, menurut bapak apakah dari segi kuantitas dan kualitas sudah memadai ?	kalau berbicara masalah SDM, memang SDM yang ada masih kurang dan perlu penambahan lagi, karena kami dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sementara SDM yang ada pada kami terbatas jumlahnya.

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Banyu Asin

**Tempat/Tanggal/Waktu** : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pangkal Niur,  
25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Mengenal program ini semenjak jadi PPL. Informasi ini saya terima dari dinas pertanian dan melalui pertemuan rutin dari BKP di BPP.
2.	Apakah saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Saya mengetahui, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan tercukupinya pangan dengan adanya peningkatan produksi.
3.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Baik, dan mendukung program ini. Hanya menjadi kendala bagi kami adalah bibit yang ada terlambat sampai ke lokasi dan agak terlambat dari musim tanam, sehingga ada sebagian petani yang menanam menggunakan benih lokal seperti varietas utan antu, raden dan muket.
4.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Paham karena sebelumnya sudah ada penejelasannya, yaitu dinas pertanian tentang pelaksanaan program BLBU dan dari rapat-rapat di BPP dibicarakan juga tentang adanya program bantuan benih ini melalui BLBU
5.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Adanya kegiatan ini maksudnya Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut saya secara pribadi maupun dinas dan selaku PPL menyambut dengan sangat baik program ini, mengapa saya katakan demikian karena kami selaku Penyuluh Pertanian Lapangan yang lebih banyak berhadapan dengan petani yang ada dilapangan ini merasa bagaimana

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>ya, boleh dikatakan prihatin, karena kalau tidak ada bantuan benih dari pemerintah, benih yang mereka gunakan adalah benih yang mereka hasilkan dari panen yang ada kemudian mereka pilih yang bernas untuk dijadikan benih pada musim tanam berikutnya, jadi benih itu-itu saja yang mereka gunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang mereka peroleh, jadi saya katakan sekali lagi bahwa dengan adanya program ini saya selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kalau dikelola dengan baik dan intensif maka dengan benih yang unggul hasil yang didapat saat panen lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan benih lokal atau benih yang tidak bersertifikat sehingga saya merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan. Namun yang perlu diperbaiki disini adalah masalah irigasinya, karena sarana irigasi disini belum baik atau maksimal, sebagai contohnya, masih sering banjir kalau hujan terlalu deras, sehingga sangat mengganggu, terutama pada saat panen hal ini akan berpengaruh pada hasil panen. Kalau padinya terendam air, maka bisa merusak tanaman padi tersebut, maka dengan ini hasil yang didapat juga rendah.</p> <p>Jadi Kalau ditanya masalah komitmen, ya pasti adalah. Kami sebagai PPL ini kan harus selalu mendukung setiap ada program pemerintah, bukan hanya program BLBU ini saja, mungkin program-program yang lain juga harus kami dukung”</p>
6.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan	Sangat bagus dan petani masih mengharapkan bantuan seperti ini.
7.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Sangat Tepat dan sangat bermanfaat bagi petani kami. Hanya pada saat pelaksanaannya tempo hari, karena kondisi irigasinya tidak baik, maka lahan sawahnya banjir, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Jadi perlulah diperbaiki dan ditingkatkan lagi kualitas sarana irigasi di lokasi kami ini. Jadi kalau ada program ini lagi, maka kami akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Berbura

**Tempat/Tanggal/Waktu** : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pangkal Niur,  
25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Kalau ditanyakan mengenai hal ini, saya mengenal adanya program BLBU ini dan informasi ini saya dapatkan dari hasil pertemuan kami selaku PPL dengan pihak Dinas Pertanian dan dari koordinator BPP.
2.	Apakah saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Tahu, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan tercukupinya pangan dengan adanya peningkatan produksi.
3.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Baik, dan mendukung program ini. Hanya menjadi kendala bagi kami adalah bibit yang ada terlambat sampai ke lokasi dan agak terlambat dari musim tanam, sehingga ada sebagian petani yang menanam menggunakan benih lokal seperti varietas utan antu, raden dan muket.
4.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Alhamdulillah paham karena ada penjelasan dari pihak dinas tentang pelaksanaan program BLBU.
5.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Pasti, saya selalu mendukung dan berkomitmen untuk dapat mesukseskan program ini, yaitu program BLBU, dan kami berharap agar benih yang datang tidak terlambat untuk tahun – tahun berikut, kalau masih terlambat, kemungkinan kami tidak mau lagi menerima dan tidak mau menanam benih BLBU tersebut karena akan berpengaruh

No	Pertanyaan	Jawaban
		dengan hasilnya.
6.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan	Menurut saya sangat baik karena sangat membantu petani, apalagi benihnya gratis dan produktivitasnya tinggi.
7.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Tepat dan diharapkan produksi yang didapat lebih tinggi daripada menggunakan benih lokal.

UNIVERSITAS TERBUKA

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pangkal Niur

**Tempat/Tanggal/Waktu** : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pangkal Niur,  
25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Saya mengenal adanya program BLBU ini, melalui ketika adanya sosialisasi program BLBU dari dinas pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Selain itu juga setiap rapat di BPP selalu melalui koordinator BPP membicarakan program BLBU tersebut.
2.	Apakah saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Tahu, Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produksi padi sawah dan ladang.
3.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Baik, dan mendukung dengan adanya program ini. Kami selaku petugas yang ada di lapangan selalu diinformasikan tentang kegiatan ini dan diminta untuk selalu mendukung program ini.
4.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak dinas pertanian dan dari BKP melalui Koordinator BPP, kami dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dari proram bantuan benih ini. Kami selaku PPL di lapangan diminta untuk membina petani yang ada di wilayah kerja kami masing-masing.
5.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut Kami selaku PPL sangat baik, jadi kami selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat mereka harapkan

No	Pertanyaan	Jawaban
6.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan	Menurut saya program ini baik untuk dilaksanakan, karena sangat membantu petani, apalagi benihnya gratis, sedangkan benih yang gratis susah didapat, selain dari bantuan-bantuan seperti program ini dan petani kami sangat menerima dengan adanya program ini. Hanya yang perlu diperhatikan juga disini adalah tentang sarana irigasi yang ada, kalau bisa untuk kedepannya perlu ditingkatkan kualitasnya, agar program ini dapat betul-betul maksimal
7.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Kebijakan program ini sudah tepat sekali bagi kami di Bangka ini, karena untuk mendapatkan benih unggul itu bagi petani kami perlu biaya yang cukup tinggi dan harus membelinya dari pulau jawa dan sumatera dan itu per ongkos.

UNIVERSITAS TERBUKA

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pugul

**Tempat/Tanggal/Waktu** : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pangkal Niur,  
25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Saya Kenal dan informasi ini kami dapatkan dari pihak dinas pertanian dan dari coordinator BPP dan setiap kali ada rapat di BBP, hal ini juga kami bicarakan tentang kesiapan dilokasi masing-masing.
2.	Apakah saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Tahu, tujuannya untuk peningkatkan produksi.
3.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Tanggapannya baik dan sangat mendukung sekali.
4.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Secara umum saya memahami program ini, dari tujuan dan sasarannya, semua itu sudah kami dapatkan penejelsaanya dari pihak dinas pertanian dan BKP melalui koordinator BPP kami.
5.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diberikan pemerintah ini menurut Kami selaku PPL sangat baik, jadi kami selaku PPL sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami merasa sangat besar artinya bagi petani kami dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul yang sangat

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>mereka harapkan.            Komitmen saya selaku PPL pasti ada untuk mensukseskan program ini, namun yang menjadi kendala kami adalah benih datang terlambat dan tidak sesuai dengan musim tanam. Akibatnya hasil yang diperoleh tidak maksimal dan boleh dikatakan gagal. Selain itu juga ada serangan penyakit blast.</p>
6.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan	Program ini baik untuk dilaksanakan dan ini sebenarnya sangat membantu sekali bagi petani, apalagi benih ini benih unggul.
7.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Sangat tepat dan kalau bisa untuk tahun berikutnya benih didistribusikan dengan tepat sesuai dengan musim tanam, sekitar bulan juli atau agustus, jangan seperti tahun lalu bulan oktober baru datang benihnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Transkrip Hasil Wawancara**

**Nama Informan** : **Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Puding Besar**

**Tempat** : **Hotel Serrata Pasir Padi, 20 Juni 2012**

**Pewawancara** : **Peneliti**

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika ya, kapan dan dari mana anda mengetahuinya ?	Saya mengenal adanya program ini dari BKP dan Dinas Pertanian pada saat ada rapat di kabupaten bersama Dinas pertanian dan BKP. Jadi sampai saat ini informasi yang kami dapat tentang kegiatan ini masih cukup lancar dan jelas karena koordinasi setiap saat tetap kami lakukan.
2.	Apakah saudara tahu apa tujuan dan sasaran program bantuan langsung benih unggul ini?	Tujuan program ini adalah untuk peningkatan produksi padi dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
3.	Bagaimana tanggapan dari instansi/lembaga Saudara dengan adanya kebijakan program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah mendukung sepenuhnya?	Tanggapannya baik dan pihak Badan sangat mendukung program ini dan kami diminta oleh kepala Badan untuk dapat sama-sama mensukseskan program ini.
4.	Bagaimana pemahaman anda secara umum mengenai kebijakan program bantuan langsung benih unggul? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang belum anda pahami.	Saya cukup paham dengan adanya program ini karena sudah ada penjelasan dari pihak dinas pertanian dan BKP.
5.	Apakah anda mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan	BLBU ini merupakan salah satu program Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan Peningkatan Produksi Benih Nasional (P2BN),

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>program bantuan langsung benih unggul di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?</p>	<p>jadi kami selaku PPL yang tugasnya lebih banyak berhadapan dengan petani, yaitu sebagai pembina petani di lapangan sangat mendukung sekali dengan adanya program ini dan kami wajib dapat mensukseskan program ini demi pemenuhan beras di Kabupaten Bangka. Namun dalam pelaksanaannya kami merasa ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti jaringan irigasi yang ada di wilayah kerja kami ini masih sifatnya semi teknis bukan teknis. Hal ini mengakibatkan proses pengairan di sawah tidak dapat berjalan atau terlaksana dengan maksimal, dan disamping itu juga, saluran irigasi yang ada juga ada sebagian yang rusak. Hal ini menjadikan air tidak bisa masuk ke lahan. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kalau bisa sarana irigasi ini diperhatikan dengan cermat, karena ini sangat penting demi membantu pelaksanaan program BLBU ini, apalagi program BLBU ini bukan hanya tahun 2012 ini saja, namun tahun-tahun berikutnya juga akan ada lagi program ini. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perhatian dari Balai proteksi dalam rangka mendukung penanggulangan serangan hama dan penyakit, sebab pada pelaksanaan BLBU kali ini, untuk lokasi binaan kami terkena serangan pada pangkal tangkai malai, sehingga banyak padi yang hampa,”</p>
6.	<p>Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik untuk dilaksanakan</p>	<p>Menurut saya kebijakan ini sangat baik untuk dilaksanakan, mengingat kebutuhan benih unggul bermutu ini memang sangat dibutuhkan oleh petani dan petani masih mengharapkan bantuan seperti ini.</p>
7.	<p>Menurut Saudara apakah kebijakan program ini sudah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?</p>	<p>Kebijakan ini sudah tepat dan bermanfaat bagi petani, hanya yang perlu diperhatikan untuk lokasi kami sendiri adalah masalah irigasinya. Kalau bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga hasil yang didapat benar-benar maksimal, seperti ada lahan yang tidak dapat diiri. Kami selaku PPL harus komitmen</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>dengan program ini, apalagi saya sebagai coordinator PPL pasti harus lebih berkomitmen untuk melaksanakan program ini. Cuma yang menjadi kendala bagi kami adalah masih adanya saluran irigasi yang kurang baik, sehingga masih lahan sawah kami yang tidak dapat diairi air , artinya air untuk pengairannya tidak seluruhnya sampai ke lahan. Hal disebabkan saluran irigasi yang rusak. Padahal petani kami sangat antusias sekali dengan adanya program ini. Jadi kalau ditanya tentang komitmen dan dukungan dari kami pasti kami dan petani kami selalu berkomitmen untuk melaksanakan program yang cukup baik ini.</p>

UNIVERSITAS TERBUKA

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Haji Muhasim

**Tempat** : Pangkal Niur, 25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Kami tahu adanya bantuan benih padi yang diberikan oleh pemerintah untuk kami dan kami semua sangat berterima kasih atas bantuan ini. Mudah-mudahan hasil padi kami lebih baik dengan adanya bantuan ini. Sebelum benih padi ini datang, terlebih dahulu kami telah dikasihtahu oleh PPL kami untuk dapat mempersiapkan tempat penampungan sementara sebelum benih tersebut dibagikan ke anggota kami masing-masing
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Kalau informasi dari PPL pak, yang kami tau yaitu untuk meningkatkan produksi padi.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Pada saat disuruh kumpul, kadang-kadang agik ade (ada) anggota kelompok yang dak (tidak) adir (hadir), mungkin ade (ada) gawi (pekerjaan) yang laen (lain)
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Kalau kami menganggap petugas PPL kami cukup baik baik pak.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi	Kami selaku petani sangat mendukung sekali dengan adanya program BLBU ini, karena kami selama ini kalau tidak ada bantuan, benih yang kami pakai berasal benih yang ada sejak nek (nenek) akek (kakek) kami luk lah (dahulu) kalok (kalau) nek (mau) be ume (berladang dan

No	Pertanyaan	Jawaban
	petani ?	besawah). Sedengken (sedangkan) kalau kamu mau beli dari luar Bangka ni, harge (harga) e mahal, jadi kalau ada program BLBU in kami merasa sangat besar artinya bagi kami sebagai petani ne (ini),.....ape agik (apalagi) benih itu gratis, jadi kamai dak (tidak) perlu mengeluarkan biaya untuk beli (membeli) benih tersebut bila perlu tiap taon (setiap tahun) kami mau.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ? Kalau tidak, mengapa ?	Berminat sekali kami ikut program ini pak karena kami sangat membutuhkan benih yang unggul.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Transkrip Hasil Wawancara**

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Andi

**Tempat** : Pugul, 25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Kenal pak, sebelumnya PPL kami telah memberitahukan tentang bantuan benih untuk desa kami.
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Menurut ketangan dari PPL kami, tujuannya untuk meningkatkan produksi.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Pernah, oleh PPL dan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Cuku baik pak.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Baik dan bermanfaat bagi kami pak.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ? Kalau tidak, mengapa ?	Berminat, karena sangat bermanfaat bagi kami.

**Transkrip Hasil Wawancara**

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Munzir

**Tempat** : Berbura, 25 Juni 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	kenal, melalui pemberitahuan PPL yang bertugas pada desa kami.
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Untuk meningkatkan produksi dan membantu petani mencari benih unggul.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Sosialisasi pernah dilakukan di BPP, oleh petugas dari dinas pertanian kabupaten dan PPL yang bertugas di desa kami.
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Baik .
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Baik dan bermanfaat sekali bagi kami.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ? Kalau tidak, mengapa ?	Berminat

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Junai

**Tempat** : Banyu Asin

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Kami sudah diberi tahu oleh PPL kami tentang adanya bantuan benih padi untuk kelompok tani, namun kami belum tahu kapan benih tersebut dibagikan kepada kami
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Saat PPL datang ke lokasi, beliau pernah mengatakan tentang program bantuan benih ini.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Sosialisasi ada di BPP dan pada saat PPL melakukan pembinaan ke lokasi kami.
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Selama ini PPL yang melakukan pembinaan kepada kami sering memberikan informasi kepada kami cara-cara budidaya padi sawah ini.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Program ini baik sekali untuk kami disini guna meningkatkan produksi padi kami dan membantu sekali bagi kami.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ?	Kami berminat untuk melaksanakan program ini, sekarang malahan kami berharap ada peningkatan bagi sarana irigasi kami yang ada sekarang, jadi dapat

No	Pertanyaan	Jawaban
	Kalau tidak, mengapa ?	lebih membantu lagi dalam usaha peningkatan produksi padi.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Transkrip Hasil Wawancara**

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Kasmiran

**Tempat** : Tanah Bawah, 4 Juli 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Saya mengenal program ini dari PPL dan ada juga pemberi tahuan dari pihak dinas pertanian yaitu pak Awaludin yang pernah ke sini dan melihat langsung ke lokasi sawah kami.
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Dari informasi yang kami terima bahwa program ini untuk meningkatkan produksi dan dapat membantu petani agar lebih mudah mendapatkan benih unggul.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Pernah, melalui PPL dan petugas dari dinas pertanian kabupaten.
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	PPL yang ada sudah cukup baik.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Petani disini sangat mendukung program bantuan benih unggul ini. Bantuan benih ini sangat baik bagi kami petani, karena benih yang diberikan benih unggul sehingga kami mengharapkan dapat hasil panen yang lebih tinggi.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ?	Kami sangat berminat dan kami sangat berterima kasih atas diberikan bantuan benih ini pak, namun yang kami merasa ada kendala adalah hal irigasi yang ada pada lahan sawah kami ini. Bendungan

No	Pertanyaan	Jawaban
	Kalau tidak, mengapa ?	tempat penampung air ada yang bocor, sehingga ada air yang mengalir dari bawah bendungan itu, jadi kami sangat mengharapkan sekali ada perbaikan dari pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Transkrip Hasil Wawancara**

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Zubir  
**Tempat** : Labu, 4 Juli 2012  
**Pewawancara** : Peneliti  
**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Kenal pak. Petugas dari dinas kabupaten dan PPL kami yang memberitahukannya.
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Informasi yang kami dapat dari petugas yang datang mengatakan untuk meningkatkan produksi padi.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Sosialisasi pernah dilakukan di BPP yang dilakukan pihak dinas dan PPL yang ada.
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Cukup pak, karena ada PPL dan Penyuluh hama juga. Kalau petugas kami sudah sering memberikan bimbingan kepada kami.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Program pemerintah ini bagi kami petani sangat baik apalagi kami ini sangat membutuhkan sekali benih unggul ini. Benih ini diberikan pemerintah secara gratis dan Cuma-Cuma kepada kami, jadi kami sangat mendukung sekali program pemerintah ini Kami juga berharap pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan bagi kami petani.
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ?	Berminat pak, karena benih yang dibantu itu kan bagus dan unggul.

No	Pertanyaan	Jawaban
	Kalau tidak, mengapa ?	

UNIVERSITAS TERBUKA

### Transkrip Hasil Wawancara

**Nama Informan** : (Ketua Kelompok Tani), Pak Juhar

**Tempat** : Nibung, 4 Juli 2012

**Pewawancara** : Peneliti

**Hasil** :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Saudara mengenal Program Bantuan Langsung Benih Unggul ? Jika ya, kapan dan dari mana mengetahuinya ?	Kami mengenal program ini dari PPL kami dan ada juga pemberitahuan dari dinas pertanian seperti dari pak Awaludin kabid pertanian.
2.	Apakah Saudara tahu apa tujuan program bantuan langsung benih unggul?	Tujuannya untuk meningkatkan produksi padi kami.
3.	Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi dari Dinas terkait?	Sosialisasi yang pernah kami ikuti di Balai Penyuluhan Pertanian.
4.	Menurut Saudara apakah jumlah dan pengetahuan petugas sudah cukup memadai?	Kami rasa cukup pak dan kami juga pernah diberikan penyuluhan oleh petugas kami.
5.	Menurut Saudara apakah kebijakan program ini baik dan bermanfaat untuk dilaksanakan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi petani ?	Program bantuan benih unggul ini sangat kami harapkan dan kami senang sekali dengan adanya bantuan benih unggul ini. Kalau tidak ada bantuan benih, kami menggunakan benih lokal jadi hasilnya belum tentu tinggi dan dengan menggunakan benih unggul ini kami mengharapkan dapat mendapatkan hasil yang tinggi
6.	Apakah Saudara berminat untuk ikut dalam program bantuan langsung benih unggul ini ? Kalau ya, mengapa ? Kalau tidak, mengapa ?	Sangat berminat pak, benih ini diberikan secara gratis, jadi kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan kebutuhan kami ini.

Lampiran : 3. Dokumentasi Penelitian



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

**Keterangan :**

1. Gambar 1,2 dan 3 : Peneliti melapor kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka dimulainya pelaksanaan penelitian.
2. Gambar 4,5 dan 6 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Kepala Bidang Pertanian dan Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Tani
3. Gambar 7,8,9,10, 11 dan 12 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pugul, Pangkal Niur, Banyu Asin dan Berbura di BPPK Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip.

4. Gambar 13 dan 14 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Ketua Kelompok Tani di Desa Pangkal Niur.
5. Gambar 15 dan 16 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Ketua Kelompok Tani di Desa Banyu Asin.
6. Gambar 17 dan 18 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan kecamatan Puding Besar.
7. Gambar 19 dan 20 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Ketua Kelompok Tani di desa Tanah Bawah.
8. Gambar 21 dan 22 : Kondisi sarana irigasi di Desa Tanah Bawah.
9. Gambar 23 dan 26 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Ketua Kelompok Tani di Desa Nibung.
10. Gambar 27 : Kondisi saluran pembuangan (Drainase) di lokasi sawah Desa Nibung.
11. Gambar 28 dan 29 : Peneliti sedang melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Ketua Kelompok Tani di Desa Labu.